



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023

Biro Hukum

Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah



DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	1
DAFTAR TABEL	3
DAFTAR GAMBAR	5
KATA PENGANTAR	6
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	7
1.2 Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi	8
1.3 Isu-isu Strategis	11
1.4 Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran	13
1.5 Sistematika Penulisan	16
1.6 Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023	18
1.7 Langkah Perbaikan Internal OPD	18
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD	20
2.2 Strategi dan Arah Kebijakan	20
2.3 Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2023	21
2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2023	23
2.5 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja	26
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	31
3.2 Realisasi Anggaran	56
3.3 Inovasi	57
3.4 Penghargaan	58
BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	63
4.2 Rekomendasi	65

LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja 2023

Aduan Masyarakat yang difasilitasi Biro Hukum Tahun 2023

Penilaian Kabupaten/Kota Peduli HAM Tahun 2023

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 : Pemetaan Permasalahan Utama (<i>Strategic Issued</i>)	13
Tabel 1.2 : Susunan Kepegawaian Berdasarkan Jabatan	14
Tabel 1.3 : Susunan Kepegawaian Berdasarkan Pangkat/Gol. Ruang	14
Tabel 1.4 : Susunan Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan	15
Tabel 1.5 : Susunan Kegawaian Berdasarkan Jenis Kelamin	15
Tabel 1.6 : Sarana Dan Prasarana	16
Tabel 1.7 : Langkah Perbaikan Internal OPD	19
Tabel 2.1 : Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Biro Hukum	21
Tabel 2.2 : Rencana Kerja Biro Hukum Tahun 2023	21
Tabel 2.3 : Sasaran, Strategis dan Arah Kebijakan Biro Hukum	22
Tabel 2.4 : Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	23
Tabel 2.5 : Perjanjian Kinerja Biro Hukum Tahun 2023	24
Tabel 2.6 : Program dan Kegiatan Biro Hukum Tahun 2023	25
Tabel 3.1 : Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis Tahun 2023	31
Tabel 3.2 : Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023	33
Tabel 3.3 : Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2023 Dengan Tahun Sebelumnya	34
Tabel 3.4 : Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2023 Dengan Target Jangka Menengah	35
Tabel 3.5 : Analisis Penyebab Keberhasilan	37
Tabel 3.6 : Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	38
Tabel 3.7 : Analisis Program Dan Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja	39
Tabel 3.8 : Pengharmonisasi, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Raperda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023	41
Tabel 3.9 : Daftar Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023	44

Tabel 3.10	: Inventarisasi Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Rapergub Jawa Tengah Tahun 2023	48
Tabel 3.11	: Inventarisasi Analisis, Evaluasi dan Pengkajian Produk Hukum Tahun 2023	49
Tabel 3.12	: Capaian Kinerja Sub Kegiatan Fasilitasi dan Evaluasi Produk Kabupaten/Kota	50
Tabel 3.13	: Fasilitasi Penanganan Perkara oleh Biro Hukum Tahun 2023	51
Tabel 3.14	: Daftar Penanganan Perkara Oleh LBH di Jawa Tengah Yang Bekerjasama Dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023	53
Tabel 3.15	: Fasilitasi Penanganan Sengketa Aset Tahun 2023	55
Tabel 3.16	: Capaian Anggaran Program Dan Kegiatan	62

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 : Cascading Biro Hukum Tahun 2023	10
Gambar 1.2 : Peta Proses Bisnis Biro Hukum Setda Prov. Jateng	10
Gambar 1.3 : Struktur Organisasi Biro Hukum	11
Gambar 2.1 : Single Sign On (SSO) Aplikasi GRMS	26
Gambar 2.2 : Aplikasi e-Budgeting	26
Gambar 2.3 : Aplikasi e-Controlling	27
Gambar 2.4 : Aplikasi e-RKO	27
Gambar 2.5 : Website Perpustakaan JDIH Biro Hukum	28
Gambar 2.6 : Website JDIH Biro Hukum	28
Gambar 2.7 : Aplikasi Elektronik Produk Hukum Daerah (e-PHD)	29
Gambar 2.8 : Aplikasi Pelita Jateng	29
Gambar 2.9 : Aplikasi Waskito Jateng	30
Gambar 2.10 : Aplikasi RANHAM Provinsi Jawa Tengah	30
Gambar 3.1 : Penerimaan Penghargaan Terbaik I JDIH Awards Tahun 2023	59
Gambar 3.2 : Piala dan Piagam Penghargaan Terbaik I JDIH Tahun 2023	60
Gambar 3.3 : Penerimaan Penghargaan Pembina Kabupaten/Kota Peduli HAM Tahun 2023	61

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, bahwa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa output maupun outcomes.

Disisi lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Dan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023.

Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Tahunan 2023, Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dan Rencana Strategis 2018 – 2023 serta Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2023 yang telah ditetapkan.

Semarang, 31 Januari 2024

KEPALA BIRO HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH



IWANUDDIN ISKANDAR, SH. MHum.

Pembina Utama Muda

NIP. 19711207 199503 1 003

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring dengan semangat reformasi dan otonomi daerah, pemerintah dituntut untuk melakukan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama pola manajemennya. Salah satu perubahan yang dimaksud adalah penerapan paradigma Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yaitu pemerintahan yang bersih dan mampu menyediakan *public goods and service* yang merupakan syarat bagi pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa Indonesia. Tuntutan publik menghendaki agar pemerintah dapat menerapkan paradigma pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang memberikan nuansa peran dan fungsi yang seimbang antara pemerintah, swasta dan masyarakat, dengan prinsip yang mendasarinya yaitu adanya transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Agar "*good governance*" dapat menjadi kenyataan dan berjalan dengan baik, maka dibutuhkan komitmen dan keterlibatan semua pihak yaitu pemerintah dan masyarakat. *Good Governance* yang efektif menuntut adanya koordinasi yang baik, integritas, profesional serta etos kerja dan moral yang tinggi. Disamping itu juga masyarakat menuntut adanya supremasi hukum, terjaminnya kepastian hukum, perlindungan hukum yang adil dan merata, penegakan keadilan yang obyektif dan manusiawi, produk hukum daerah yang melindungi kepentingan masyarakat, serta peningkatan kualitas penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan dan pemajuan terhadap Hak Asasi Manusia.

Dalam rangka menjawab berbagai permasalahan hukum di wilayah Provinsi Jawa Tengah, maka Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membentuk lembaga Biro Hukum di bawah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9

Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, sehingga diharapkan permasalahan-permasalahan di bidang hukum yang selalu mengalami perubahan dan perkembangan dari waktu ke waktu dapat teratasi.

Disamping itu pula diharapkan keberadaan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dapat mendukung program visi dan misi Gubernur Jawa Tengah. Diantaranya adanya permasalahan yang perlu ditangani dengan belum optimalnya rekomendasi penyusunan kebijakan daerah dan belum optimalnya fungsi pembinaan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan bidang hukum di Kabupaten/Kota.

1.2 Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi

Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat Bidang Hukum, pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di Bidang Perundang-Undangan, Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Pengawasan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah di Bidang Perundang-Undangan, Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Pengawasan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di Bidang Perundang-Undangan, Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Pengawasan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota;
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di Bidang Perundang-Undangan, Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Pengawasan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota;
- d. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat Bidang Hukum;
- e. Pelaksanaan pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di Bidang Perundang-Undangan, Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Pengawasan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

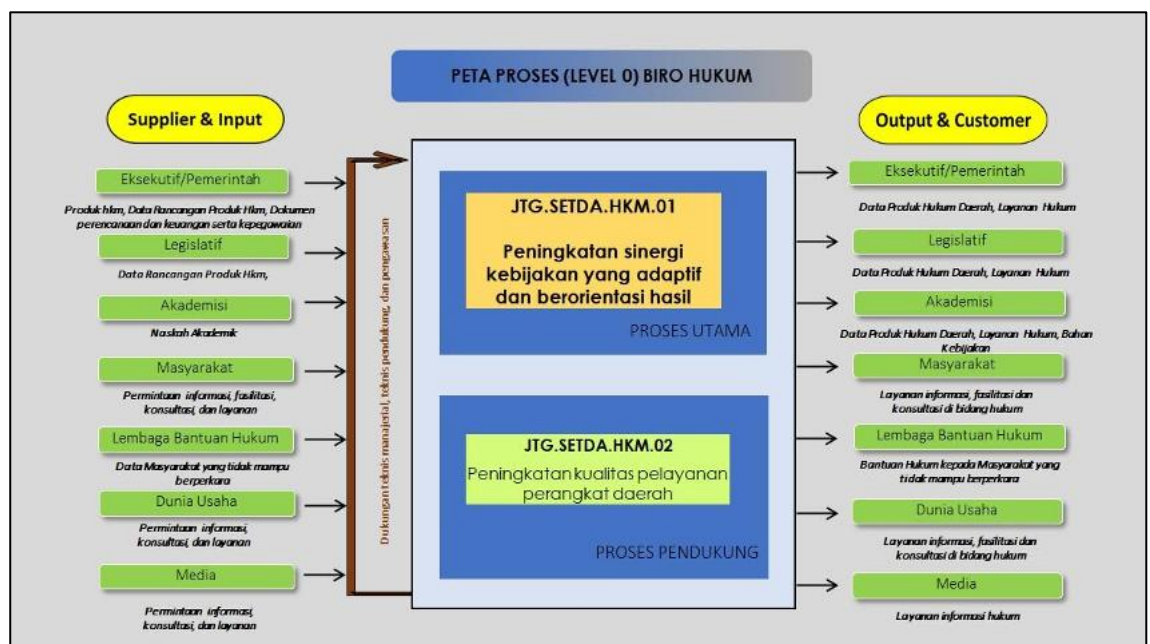
Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta pembangunan daerah pada bidang hukum, telah disusun Rencana Strategis Tahun 2018–2023 yang memuat sasaran strategis, indikator kinerja dan target indikator kinerja sebagai penjabaran atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Sebagai proses penjabaran dan penyelarasan Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU), dan/atau target IKU secara vertikal dari level tinggi ke level rendah telah disusun Cascading sebagaimana pada Gambar 1.1.



Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah melaksanakan hubungan kerja secara efektif dan efisien antar instansi dan/atau unit kerja di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi para pemangku kepentingan. Peta proses bisnis tersaji pada Gambar 1.2.

Gambar 1.2.
Peta Proses Bisnis Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah



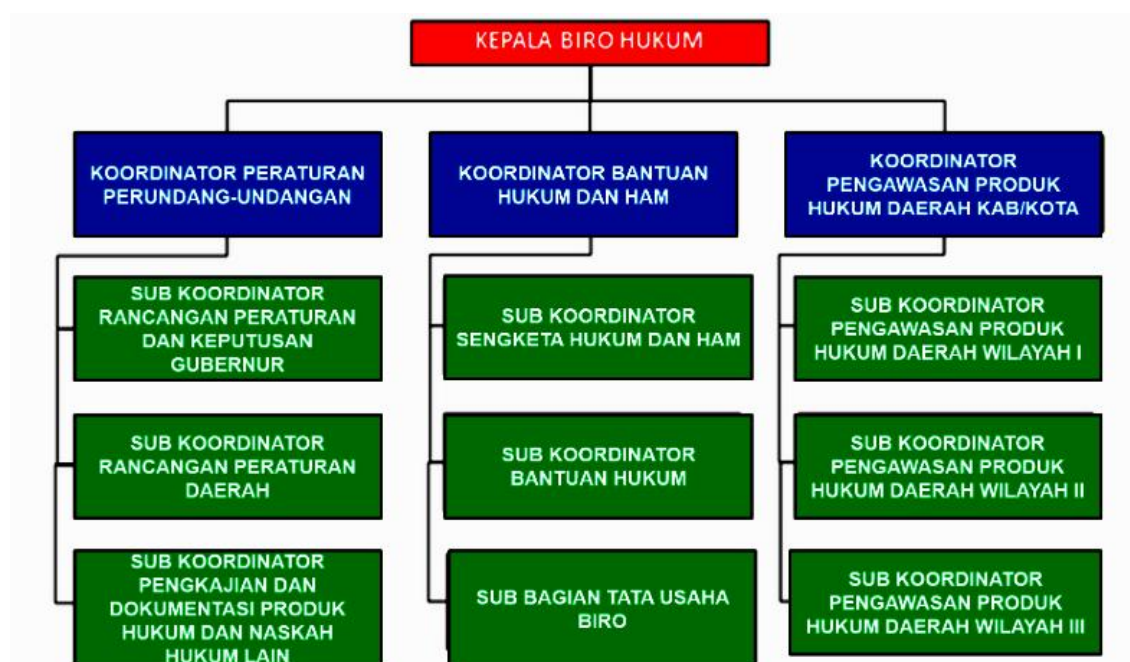
Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dibantu/membawahi :

1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro;
2. Kelompok Jabatan Fungsional;

pada ruang lingkup teknis Peraturan Perundang-undangan, Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan Pengawasan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota.

Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah menjalankan tugas pokok dan fungsi sesuai struktur organisasi berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, sebagai berikut :

Gambar 1.3.
Struktur Organisasi Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah



1.3 Isu-isu Strategis

Potensi permasalahan di hukum pada umumnya timbul dari beberapa faktor baik secara internal maupun eksternal, diantaranya kemampuan SDM yang belum didayagunakan secara optimal, koordinasi

yang masih kurang, kepatuhan aparaturnya dan masyarakat terhadap hukum yang berlaku, perkembangan keadaan dan situasi jaman yang selalu mengalami dinamika dan perubahan yang berdampak pada produk-produk hukum yang sedang berlaku, serta hal-hal lain yang tidak diantisipasi. Untuk mendapatkan gambaran bagaimana permasalahan di bidang hukum dapat dipecahkan dan diselesaikan dengan baik, tiap-tiap permasalahan juga diidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilannya dimasa datang. Faktor-faktor penentu keberhasilan adalah faktor kritis, hasil kinerja, dan faktor-faktor lain yang memiliki daya ungkit yang tinggi dalam memecahkan permasalahan di bidang hukum atau dalam mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.

Upaya untuk mewujudkan tujuan pembangunan daerah terutama di bidang hukum telah dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui serangkaian kebijakan dan program serta sumber pendanaan secara sinergis dan berkelanjutan. Berdasarkan hasil evaluasi, terdapat berbagai aspek pembangunan bidang hukum yang telah mengalami kemajuan atau keberhasilan, namun di sisi lain terdapat pula berbagai permasalahan dan tantangan yang masih dihadapi dan perlu ditangani melalui serangkaian kebijakan dan program secara terencana, sinergis, dan berkelanjutan. Permasalahan-permasalahan utama (*strategic issued*) dalam pembangunan di bidang hukum yang sedang dihadapi oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah perlu diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi, baik secara internal maupun eksternal, yang menjadi pendorong munculnya permasalahan tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1.
Pemetaan Permasalahan Utama (*Strategic Issued*)

NO	MASALAH UTAMA	MASALAH	AKAR MASALAH
1.	Perencanaan penyusunan produk hukum belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan ketentuan perundang undangan.	Kajian penyusunan produk hukum belum dilakukan secara optimal dan melibatkan pemangku kepentingan terkait.	Produk Hukum Daerah tidak terimplementasi secara efektif.
2.	Ketidaksesuaian Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan lainnya sehingga menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaannya.	Ketidaksesuaian Produk Hukum Daerah Kabupaten/ Kota dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan lainnya sehingga menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaannya.	Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota tidak terimplementasi secara efektif.
3.	Tidak tertanganinya permasalahan hukum di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.	Kurangnya koordinasi antar instansi terkait dalam penanganan permasalahan hukum di Jawa Tengah.	Ketidakpastian hukum terhadap permasalahan hukum yang ditangani oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

1.4 Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran

Pada tahun 2023, Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya didukung oleh sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta anggaran sebagai berikut :

1. Susunan Pegawai

Susunan Kepegawaian Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah yaitu:

a. Berdasarkan jabatan :

Tabel 1.2.
Susunan Kepegawaian Berdasarkan Jabatan

Unit Kerja	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	JFT	JFU	Jumlah
Kepala Biro	1	-	-	-	-	1
Bagian Perundang-undangan	-	-	-	6	6	12
Bagian Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia	-	-	1	7	9	17
Bagian Pengawasan Produk Hukum Daerah Kabupaten/kota	-	-	-	6	7	13
Jumlah Total	1	-	1	19	22	43

b. Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang :

Tabel 1.3.
Susunan Kepegawaian Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang

Unit Kerja	Golongan IV	Golongan III	Golongan II	Jumlah
Kepala Biro	1	-	-	1
Bagian Perundang-undangan	1	11	-	12
Bagian Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia	2	12	3	17
Bagian Pengawasan Produk Hukum Daerah Kabupaten/kota	3	10	-	13
Jumlah Total	7	33	3	43

c. Berdasarkan Pendidikan :

Tabel 1.4.
Susunan Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan

Unit Kerja	Pasca Sarjana	Sarjana / D4	Sarjana Muda/D3	SLTA	Jumlah
Kepala Biro	1	-	-	-	1
Bagian Perundang-undangan	2	10	-	-	12
Bagian Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia	6	8	1	2	17
Bagian Pengawasan Produk Hukum Daerah Kabupaten/ kota	2	10	1	-	13
Jumlah Total	11	25	2	2	43

d. Berdasarkan Jenis Kelamin :

Tabel 1.5.
Susunan Kepegawaian Berdasarkan Jenis Kelamin

Unit Kerja	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Kepala Biro	1	-	1
Bagian Perundang-undangan	8	4	12
Bagian Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia	10	7	17
Bagian Pengawasan Produk Hukum Daerah Kabupaten/ kota	5	8	13
Jumlah Total	24	19	43

2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang dimiliki Biro Hukum untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang terdiri dari :

Tabel. 1.6.
Sarana dan Prasana

No.	Nama Barang	Jumlah	Kondisi
1	2	3	4
1.	Kendaraan Roda 4	6 Unit	Baik
2.	Kendaraan Roda 2	3 Unit	Baik
3.	Komputer	43 Unit	Baik
4.	Laptop	7 Unit	Baik
5.	Printer	41 Unit	Baik
6.	LCD/In Focus	4 Unit	Baik
7.	Pesawat Televisi	5 Unit	Baik
8.	Mesin Ketik Manual	2 Unit	Baik
9.	Ruang Rapat	3 Ruang	Baik
10.	<i>Airphone</i>	11 Unit	Baik
11.	Pesawat <i>Telephone</i>	2 Unit	Baik
12.	<i>Faximile</i>	2 Unit	Baik
13.	Kursi Tamu	6 Stel	Baik

3. Anggaran

Untuk mendukung pencapaian kinerja pada Tahun 2023, Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah didukung oleh 2 (dua) Program yaitu Program Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum, dan Program Administrasi Umum dengan total anggaran sebesar Rp.4.220.707.000,- (Empat milyar dua ratus dua puluh juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah).

1.5 Sistematika Penulisan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan memuat latar belakang dibentuknya organisasi, mandat kinerja, peta proses bisnis dan struktur organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi, permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi, dukungan SDM, sarana prasarana dan Anggaran. Selanjutnya disampaikan sistematika

penulisan, tindak lanjut atas laporan hasil evaluasi SAKIP tahun 2023 serta langkah perbaikan internal OPD.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan terkait tujuan, sasaran dan indikator kinerja OPD yang memuat rencana strategis yang terdiri dari visi, misi dan tujuan & sasaran. Selanjutnya diuraikan terkait strategi dan arah kebijakan yang menjabarkan tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam renstra. Menyampaikan struktur program dan kegiatan tahun 2023, Perjanjian Kinerja tahun 2023, Instrumen Pendukung Capaian Kinerja dengan menyajikan instrumen-instrumen pendukung penerapan SAKIP seperti GRMS, aplikasi yang dikembangkan oleh OPD, serta aplikasi dari kementerian yang digunakan jika ada.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2023, membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun sebelumnya dan beberapa tahun terakhir (2018-2023). Selanjutnya membandingkan realisasi kinerja tahun 2023 dengan standar nasional jika ada.
2. Menguraikan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
3. Menyampaikan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah. Disampaikan efisiensi anggaran apabila ada sisa anggaran. Menyampaikan

efektifitas bila capaian kinerja mencapai 100% atau lebih dan anggaran hanya terserap 96% ke bawah.

4. Menyampaikan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
5. Menyajikan inovasi-inovasi yang dilakukan dan dimiliki oleh OPD dalam mendukung kinerja di tahun 2023.
6. Menyajikan penghargaan-penghargaan yang diperoleh baik regional maupun nasional di tahun 2023.

BAB IV. PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta rekomendasi yang menampilkan langkah perbaikan yang akan dilakukan oleh organisasi kedepannya untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN :

1. Perjanjian Kinerja
2. Lain-lain yang dianggap perlu.

1.6 Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) yang dilakukan oleh Tim Evaluasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, bahwa pada Tahun 2023 tidak ada rekomendasi terhadap evaluasi SAKIP yang diberikan kepada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023.

1.7 Langkah Perbaikan Internal OPD

Tindak lanjut terhadap rekomendasi/saran pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022, adalah sebagai berikut :

Tabel 1.7.
Langkah Perbaikan Internal OPD

REKOMENDASI/SARAN



LANGKAH PERBAIKAN

Banyaknya peraturan perundang-undangan pemerintah pusat yang baru sangat diperlukan untuk melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan daerah agar tidak terjadi tumpang tindih maupun bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lain, baik yang lebih tinggi, sederajat, maupun yang lebih rendah



Telah dilakukan analisis, evaluasi, pengkajian dan pengharmonisasian terhadap produk-produk hukum yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan jaman dan rancangan produk-hukum hukum daerah sebagai tindak lanjut pelaksanaan peraturan perundang-undangan pusat yang baru

Penanganan penyelesaian perkara memerlukan banyak kelengkapan alat bukti yang valid, namun saat ini sarana pelayanan penyelesaian sengketa hukum di lingkungan Provinsi Jawa Tengah masih kurang. Untuk itu perlu meningkatkan pembinaan dan koordinasi pada OPD agar melakukan tertib administrasi terhadap file-file penting, khususnya terkait dengan data Barang Milik Daerah. Selain itu agar mengoptimalkan fungsi Pelayanan Komunikasi Masyarakat (YANKOMAS) yang merupakan pemberian layanan terhadap masyarakat tentang adanya permasalahan hak asasi manusia yang dikomunikasikan maupun yang tidak/belum dikomunikasikan.



Meningkatkan koordinasi kepada semua OPD terkait validitas kelengkapan alat bukti dalam penanganan penyelesaian perkara, serta mengoptimalkan fungsi Pelayanan Komunikasi Masyarakat (YANKOMAS) dalam pemberian layanan aduan permasalahan hukum yang dilakukan oleh masyarakat.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD

1. Visi

Dalam melaksanakan program pembangunan di Jawa Tengah Biro Hukum Sekretariat Daerah mendukung visi Gubernur Jawa Tengah yaitu **"MENUJU JAWA TENGAH SEJAHTERA DAN BERDIKARI, TETEP MBOTEN KORUPSI MBOTEN NGAPUSI"**.

2. Misi

Biro Hukum melaksanakan Misi Ke-2 dari misi Gubernur Jawa Tengah yaitu Mempercepat reformasi birokrasi serta memperluas jangkauan Pemerintah Kabupaten/Kota.

3. Tujuan & Sasaran

Berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah dimaksud, maka Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah sebagai bagian dari Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah secara umum memiliki tujuan yaitu : **"Meningkatnya Efektifitas Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah"** dan **"Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah"** dengan sasaran dan indikator strategis sebagai berikut :

- 1) Sasaran meningkatnya sinergitas kebijakan daerah dengan indikator strategis persentase efektifitas produk hukum daerah dan persentase efektivitas penyelesaian masalah hukum.
- 2) Sasaran meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah dengan indikator strategis Nilai IKM Biro Hukum.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023 untuk Biro Hukum adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1.
Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Biro Hukum

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2019	2020	2021	2022	2023
1.	Meningkatnya Efektifitas Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Sinergi Kebijakan Daerah	Persentase efektifitas produk hukum daerah	91	92	93	95	96
			Persentase Efektivitas Penyelesaian Masalah Hukum	91	92	93	95	96
2.	Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai IKM Biro Hukum	75	76	77	78	78,5

2.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Berdasarkan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2028-2023, Biro Hukum melaksanakan tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan yaitu :

Tabel 2.2.
Rencana Kerja Biro Hukum Tahun 2023

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Meningkatkan kualitas kebijakan produk hukum daerah.	Persentase rancangan produk hukum daerah yang dihasilkan sesuai kaidah pembentukan perundang-undangan	Persen	100
2.	Meningkatkan kualitas pengawasan produk hukum daerah kabupaten/kota.	Persentase rancangan produk hukum kabupaten/kota yang dievaluasi atau difasilitasi	Persen	100
3.	Meningkatkan kualitas pelaksanaan kebijakan di bidang hukum dan HAM.	Persentase bantuan hukum dan sengketa hukum yang tertangani	Persen	100
		Persentase kabupaten/kota peduli HAM	Persen	96

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
4.	Meningkatkan kualitas administrasi umum Biro Hukum	Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Hukum	Persen	100

Tabel 2.3.
Sasaran, Startegis dan Arah Kebijakan Biro Hukum
Berdasarkan RENSTRA SETDA Tahun 2018-2023

NO.	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1.	Meningkatnya Sinergitas Kebijakan Daerah	Optimalisasi sistem tata kerja penyusunan produk hukum dan Peningkatan kapasitas SDM bidang penyusunan produk hukum.	1) Penguatan Kelembagaan Sekretariat Daerah. 2) Penguatan Kapasitas ASN Biro Lingkup Sekretariat Daerah. 3) Peningkatan ketercukupan Sarana dan Prasarana Penunjang Kinerja Lingkup Sekretariat Daerah. 4) Pengembangan Jejaring Manajemen Pembangunan Daerah. 5) Peningkatan sinergi dan efektifitas pembangunan daerah.
		Meningkatnya Efektifitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.	
		Optimalisasi sistem tatakerja pengkajian produk hukum kabupaten/kota dan Peningkatan kapasitas SDM bidang pengkajian produk hukum kabupaten/kota.	
		Peningkatan aksesibilitas produk hukum daerah melalui pengembangan sistem informasi JDIH.	
		Peningkatan pemberian bantuan hukum dan penanganan sengketa hukum.	
		Optimalisasi pedampingan dan pembinaan implementasi kabupaten/kota peduli HAM.	

2.3 Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2023

Arah kebijakan yang telah ditetapkan dilaksanakan melalui program dan kegiatan, berdasarkan Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, Biro Hukum Sekretariat Daerah

Provinsi Jawa Tengah memiliki 5 program diantaranya sebagai berikut :

1. Program Fasilitas Dan Koordinasi Hukum.
2. Program Administrasi Umum.

Dari 2 program tersebut dilaksanakan melalui kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

Tabel 2.4.
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
Program Fasilitas dan Koordinasi Hukum	1. Fasilitas Penyusunan Perundang-undangan	1. Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Pengaturan. 2. Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Penetapan. 3. Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya. 4. Fasilitas dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota.
	2. Fasilitas Bantuan Hukum	1. Fasilitas Penyelesaian Masalah Hukum. 2. Fasilitas Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM.
Program Administrasi Umum	1. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
	2. Administrasi Umum Perangkat Daerah	1. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD. 2. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD.

2.4 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang

dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang *seharusnya* terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup kinerja (*outcome*) yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Biro Hukum pada Tahun 2023 telah melakukan Perjanjian Kinerja dengan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk mewujudkan target kinerja sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.5.
Perjanjian Kinerja Biro Hukum Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Meningkatkan kualitas kebijakan produk hukum daerah.	Persentase rancangan produk hukum daerah yang dihasilkan sesuai kaidah pembentukan perundang-undangan.	Persen	100
2.	Meningkatkan kualitas pengawasan produk hukum daerah kabupaten/ kota.	Persentase rancangan produk hukum kabupaten/kota yang dievaluasi atau difasilitasi.	Persen	100
3.	Meningkatkan kualitas fasilitasi pelaksanaan kebijakan di bidang hukum dan HAM.	a. Persentase Bantuan Hukum dan Sengketa Hukum yang tertangani.	Persen	100
		b. Persentase kabupaten/ kota peduli HAM.	Persen	96
4.	Meningkatkan kualitas administrasi umum Biro Hukum.	Persentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Hukum.	Persen	100

Tabel 2.6.
Penganggaran Program dan Kegiatan Biro Hukum Tahun 2023

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran (Rp.)
1.	Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum.	Persentase rancangan produk hukum daerah yang dihasilkan sesuai kaidah pembentukan perundang-undangan.	100 %	3.319.000.000
		Persentase Bantuan Hukum dan Sengketa Hukum yang tertangani.	100 %	
	a. Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan	Jumlah dokumen kajian produk hukum.	12 dokumen	1.969.000.000
	b. Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Dokumen Penyelesaian Penanganan Perkara.	12 dokumen	1.350.000.000
2.	Program Administrasi Umum	Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Hukum	100 %	901.707.000
	a. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.	1 laporan	650.000.000
	b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Biro Hukum.	2 dokumen	251.707.000

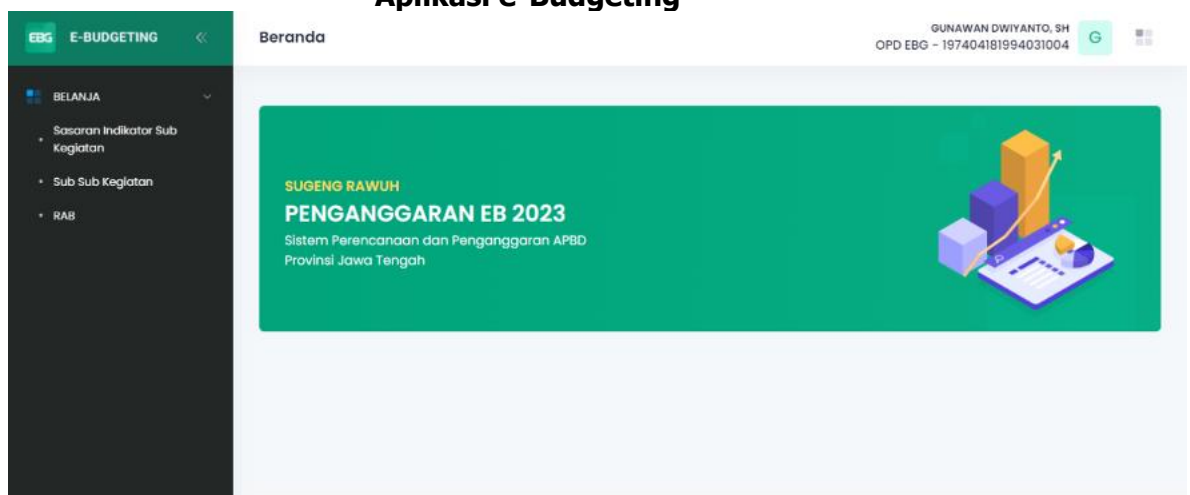
2.5 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

Biro Hukum dalam melaksanakan capaian kinerja dan penerapan SAKIP di dukung dengan instrumen-instrumen, antara lain :

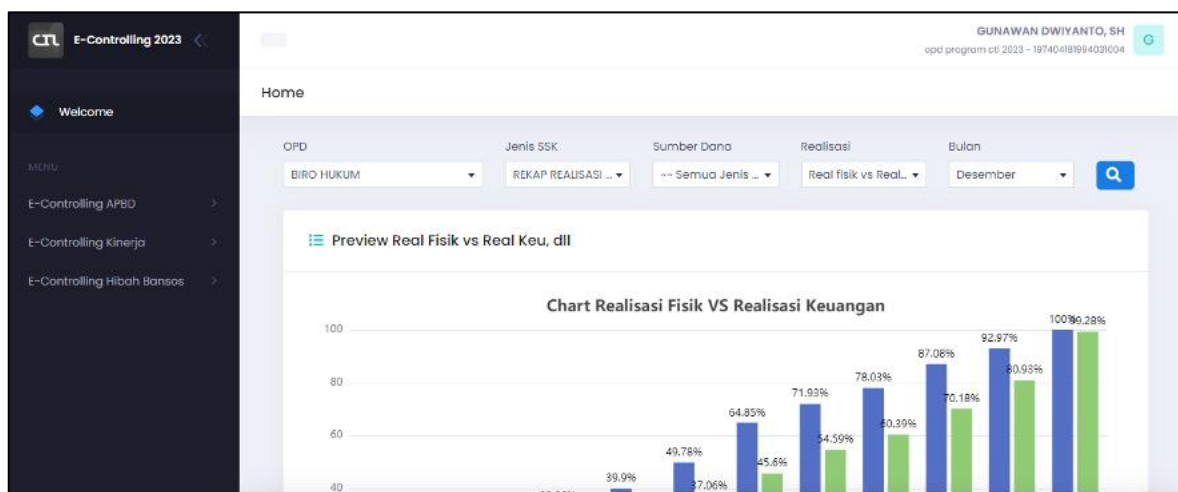
Gambar 2.1.
Single Sign On (SSO) Aplikasi GRMS



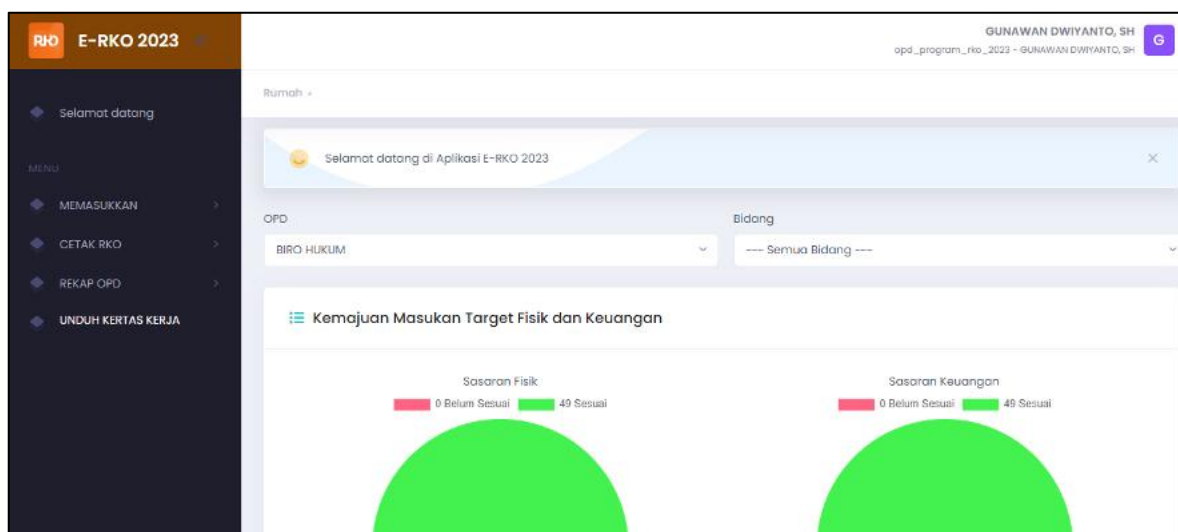
Gambar 2.2.
Aplikasi e-Budgeting



Gambar 2.3.
Aplikasi e-Controlling



Gambar 2.4.
Aplikasi e-RKO



Gambar 2.5.
Website Perpustakaan JDIH Biro Hukum



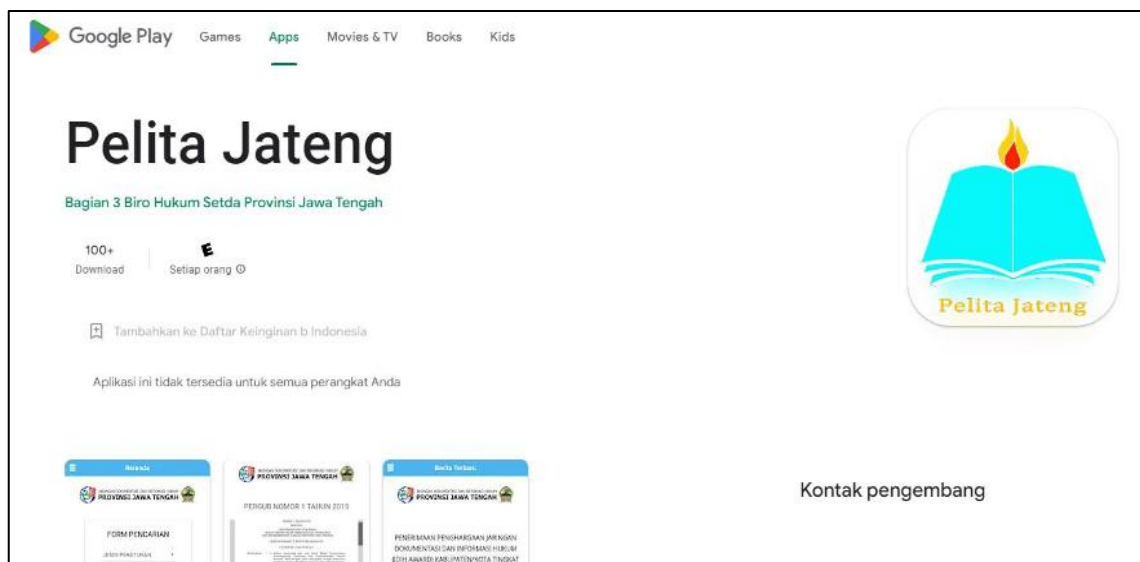
Gambar 2.6.
Website JDIH Biro Hukum



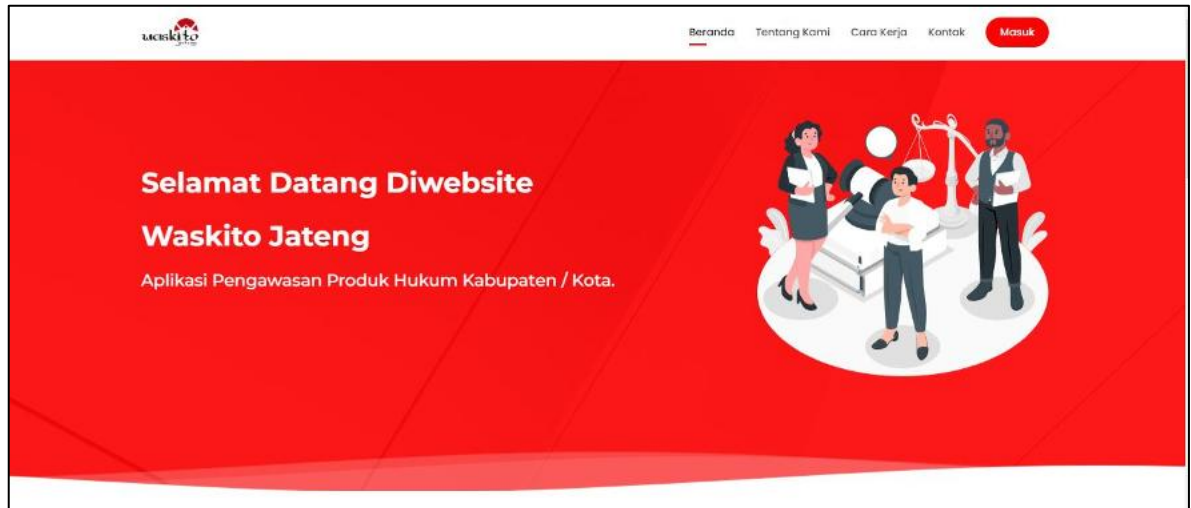
Gambar 2.7.
Aplikasi Sistem Elektronik Produk Hukum Daerah (e-PHD)



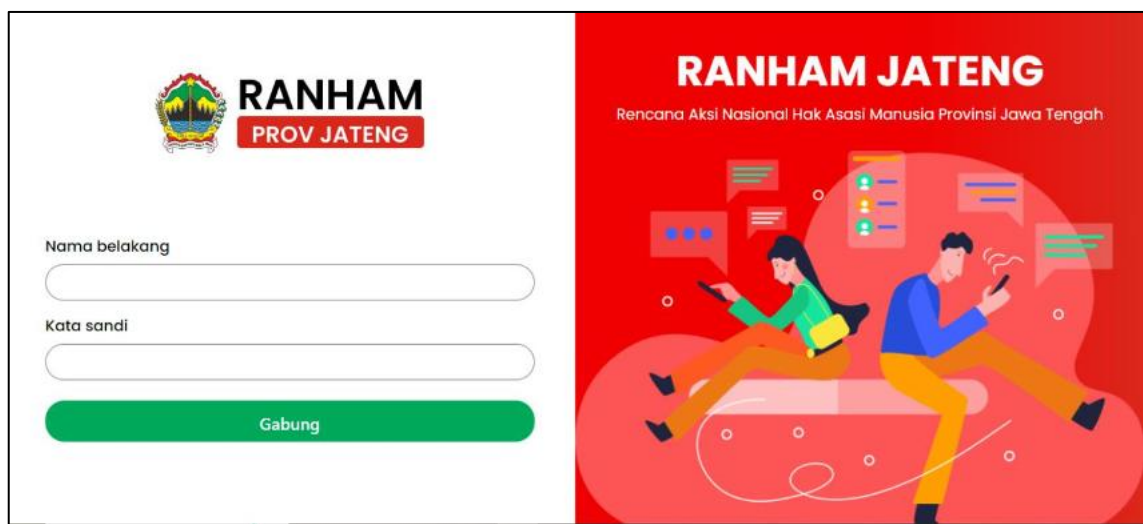
Gambar 2.8.
Aplikasi Pelita Jateng



Gambar 2.9.
Aplikasi Waskito Jateng



Gambar 2.10
Aplikasi RANHAM Prov. Jateng



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan, maka digunakan skala nilai peringkat kinerja sebagai berikut :

- a. Sangat Baik : > 100%;
- b. Baik : 85 – 100%;
- c. Cukup : 65 – 84,99%;
- d. Kurang : 50 - 64,99%;
- e. Sangat Kurang : < 50, %

Rencana Kerja Tahun 2023, Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah memiliki tujuan “Meningkatkan Efektivitas Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah” dan “Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah” dengan sasaran strategis “Meningkatnya Sinergi Kebijakan Daerah” dan “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Daerah”. Selanjutnya dalam menjabarkan pelaksanaan tujuan dan sasaran strategis tersebut, maka Biro Hukum melaksanakannya melalui sasaran strategis Biro Hukum tahun 2023 yang capaiannya dapat dilihat melalui tabel sebagai berikut :

Tabel 3.1.
Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023			Target Akhir RPJMD
				Target	Realisasi	Persentase	
1	Meningkatkan kualitas kebijakan produk hukum daerah.	Persentase rancangan produk hukum daerah yang dihasilkan sesuai kaidah pembentukan perundang-undangan.	Persen	100	100	100%	95%

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023			Target Akhir RPJMD
				Tar get	Realisasi	Persen tase	
2.	Meningkatkan kualitas pengawasan produk hukum daerah kabupaten/ kota.	Persentase rancangan produk hukum kabupaten/kota yang dievaluasi atau difasilitasi.	Persen	100	100	100%	96%
3.	Meningkatkan kualitas fasilitasi pelaksanaan kebijakan di bidang hukum dan HAM.	a. Persentase Bantuan Hukum dan Sengketa Hukum yang tertangani.	Persen	100	100	100%	96%
		b. Persentase kabupaten/ kota peduli HAM.	Persen	96	100	104%	96%
4.	Meningkatkan kualitas administrasi umum Biro Hukum.	Persentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Hukum.	Persen	100	100	100%	100%

Biro Hukum melalui **Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum** dan **Program Administrasi Umum** dengan alokasi anggaran Rp.4.220.707.000,- tercapai realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.4.190.524.215,- (99,28%). Program ini terdistribusi kedalam 4 Sasaran Program dan 5 Indikator Kinerja Program yang semuanya dengan tingkat capaian sangat tinggi yaitu persentase rancangan produk hukum daerah yang dihasilkan sesuai kaidah pembentukan perundang undangan dengan realisasi 100% sesuai dengan target yang ditetapkan, persentase rancangan produk hukum kabupaten/kota yang dievaluasi atau difasilitasi dengan realisasi 100% sesuai target, persentase bantuan hukum dan sengketa hukum yang tertangani dengan realisasi 100% sesuai target, persentase kabupaten/kota peduli HAM dengan realisasi 100% melebihi dari target 96%, dan Persentase capaian administrasi umum dan keuangan Biro Hukum tercapai 100% sesuai dengan target yang ditetapkan.

Pencapaian yang rata-rata sesuai target karena pelaksanaan koordinasi, konsultasi serta fasilitasi antara Biro Hukum dengan

Pemerintah Pusat sesuai dengan apa yang diharapkan. Pelaksanaan harmonisasi dan sinkronisasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Gubernur telah sesuai dengan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) dan Program Pembentukan Peraturan Gubernur (Propempergub). Analisis, evaluasi dan pengkajian terhadap produk-produk hukum telah dilakukan sesuai dengan target capaian. Demikian pula pendokumentasian produk-produk hukum baik secara manual maupun digitalisasi yang diupload ke dalam website Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah juga telah sesuai dengan apa yang ditargetkan. Disamping itu pula penggunaan aplikasi layanan E-PHD Provinsi Jawa Tengah, Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Provinsi Jawa Tengah, Waskito Jateng serta Pelita Jateng semakin mempermudah dalam pelaksanaan pengkajian, evaluasi, fasilitasi, penyusunan rancangan produk hukum daerah serta pendokumentasian dan penginformasian produk hukum lebih efektif dan efisien.

1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023.

Terhadap hasil kinerja tersebut dapat dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.2.
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
1.	Meningkatkan kualitas kebijakan produk hukum daerah.	Persentase rancangan produk hukum daerah yang dihasilkan sesuai kaidah pembentukan perundang-undangan.	100%	100%	100%	Sangat Baik	Bagian Perundang-undangan
2.	Meningkatkan kualitas pengawasan produk hukum	Persentase rancangan produk hukum kabu-	100%	100%	100%	Sangat Baik	Bagian Pengawasan Produk Hukum Daerah

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
	daerah kabupaten/ kota.	paten/kota yang dievaluasi atau difasilitasi.					Kabupaten/ Kota
3.	Meningkatkan kualitas fasilitasi pelaksanaan kebijakan di bidang hukum dan HAM.	a. Persentase Bantuan Hukum dan Sengketa Hukum yang tertangani.	100%	100%	100%	Sangat Baik	Bagian Bantuan Hukum Dan HAM
		b. Persentase kabupaten/ kota peduli HAM.	96%	100%	104%	Sangat Baik	Bagian Bantuan Hukum Dan HAM
4.	Meningkatkan kualitas administrasi umum Biro Hukum.	Persentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Hukum.	100%	100%	100%	Sangat Baik	Sub Bagian Tata Usaha

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa seluruh indikator kinerja program pada Biro Hukum capaian realisasinya dikategorikan **"Baik"**. Hal tersebut dikarenakan seluruh realisasi melampaui target yang telah ditetapkan yaitu dengan seluruh realisasinya tercapai 100%.

2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya dan beberapa tahun terakhir.

Tabel 3.3.
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2023 Dengan Tahun Sebelumnya

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	2021			2022			2023		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1.	Meningkatkan kualitas kebijakan produk hukum daerah.	Persentase rancangan produk hukum daerah yang dihasilkan sesuai kaidah pembentukan perundang-undangan.	94 %	100 %	106 %	95%	100 %	105 %	100 %	100 %	100 %

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	2021			2022			2023		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
2.	Meningkatkan kualitas pengawasan produk hukum daerah kabupaten / kota.	Persentase rancangan produk hukum kabupaten/ kota yang dievaluasi atau difasilitasi.	94 %	100 %	106 %	95%	100 %	105 %	100 %	100 %	100 %
3.	Meningkatkan kualitas fasilitasi pelaksanaan kebijakan di bidang hukum dan HAM.	a. Persentase Bantuan Hukum dan Sengketa Hukum yang tertangani	94 %	100 %	106 %	95%	100 %	105 %	100 %	100 %	100 %
		b. Persentase kabupaten/ kota peduli HAM.	94 %	100 %	106 %	95%	100 %	105 %	96 %	100 %	104 %
4.	Meningkatkan kualitas administrasi umum Biro Hukum.	Persentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Hukum.	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Biro Hukum dapat dilihat dari tabel sebagai berikut :

Tabel 3.4.
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2023
Dengan Target Jangka Menengah

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2023	Target Akhir 2023	Tingkat Kemajuan
1.	Meningkatkan kualitas kebijakan produk hukum daerah.	Persentase rancangan produk hukum daerah yang dihasilkan sesuai kaidah	100%	100%	Tercapai

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2023	Target Akhir 2023	Tingkat Kemajuan
		pembentukan perundang-undangan.			
2.	Meningkatkan kualitas pengawasan produk hukum daerah kabupaten/ kota.	Persentase rancangan produk hukum kabupaten/ kota yang dievaluasi atau difasilitasi.	100%	100%	Tercapai
3.	Meningkatkan kualitas fasilitasi pelaksanaan kebijakan di bidang hukum dan HAM.	a. Persentase Bantuan Hukum dan Sengketa Hukum yang tertangani	100%	100%	Tercapai
		b. Persentase kabupaten/ kota peduli HAM.	100%	96%	Tercapai
4.	Meningkatkan kualitas administrasi umum Biro Hukum.	Persentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Hukum.	100%	100%	Tercapai

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa, realisasi kinerja Biro Hukum Tahun 2023 terhadap Target Akhir RPJMD rata-rata tercapai 100%. Hal ini dikarenakan, capaian masing-masing indikator kinerja telah tercapai 100%.

- Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan.

Sedangkan analisis terhadap penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan, antara lain sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 3.5.
Analisis Penyebab Keberhasilan

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan	Solusi yang dilakukan
1.	Meningkatkan kualitas kebijakan produk hukum daerah.	Persentase rancangan produk hukum daerah yang dihasilkan sesuai kaidah pembentukan perundang-undangan.	100%	100%	100%	Rancangan produk hukum daerah yang dihasilkan telah sesuai dengan kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan dan disusun tepat waktu.	-
2.	Meningkatkan kualitas pengawasan produk hukum daerah kabupaten/kota.	Persentase rancangan produk hukum kabupaten/kota yang dievaluasi atau difasilitasi.	100%	100%	100%	Rancangan produk hukum daerah kabupaten/kota yang dievaluasi dan difasilitasi berhasil diselesaikan tepat waktu.	-
3.	Meningkatkan kualitas fasilitasi pelaksanaan kebijakan di bidang hukum dan HAM.	a. Persentase Bantuan Hukum dan Sengketa Hukum yang tertangani	100%	100%	100%	Bantuan hukum dan sengketa hukum telah tertangani selesai sesuai dengan jumlah target perkara yang masuk.	-
		b. Persentase kabupaten/kota peduli HAM.	96%	100%	104%	Pelaporan data kabupaten/kota peduli HAM telah selesai dilakukan terhadap 35 kabupaten/kota	-
4.	Meningkatkan kualitas administrasi umum Biro Hukum.	Persentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Hukum.	100%	100%	100%	Administrasi umum dan keuangan Biro Hukum telah dilakukan selesai tepat waktu.	-

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa keberhasilan kinerja masing-masing indikator pada Biro Hukum Tahun 2023 didukung oleh terlaksananya kegiatan pada tiap-tiap indikator kinerja antara lain Rancangan produk hukum daerah yang dihasilkan telah sesuai dengan kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan dan disusun tepat waktu, Rancangan produk hukum daerah kabupaten/kota yang dievaluasi dan difasilitasi berhasil diselesaikan tepat waktu, Bantuan hukum dan sengketa hukum telah tertangani selesai sesuai dengan jumlah target perkara yang masuk, Pelaporan data kabupaten/kota peduli HAM telah selesai dilakukan terhadap 35 kabupaten/kota, serta Administrasi umum dan keuangan Biro Hukum telah dilakukan selesai tepat waktu.

Selanjutnya analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah dapat dilihat melalui tabel sebagai berikut :

Tabel 3.6.
Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Indikator Program	INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
1	Persentase rancangan produk hukum daerah yang dihasilkan sesuai kaidah pembentukan perundang-undangan.	100 %	100 %	100 %	1.174.000.000	1.164.077.900	99,15	0,85
2	Persentase rancangan produk hukum kabupaten/	100 %	100 %	100 %	795.000.000	793.492.080	99,81	0,19

No	Indikator Program	INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
	kota yang dievaluasi atau difasilitasi.							
3	Persentase Bantuan Hukum dan Sengketa Hukum yang tertangani	100 %	100 %	100 %	965.000.000	962.718.590	99,76	0.24
4	Persentase kabupaten/ kota peduli HAM.	96%	100 %	104 %	385.000.000	384.400.070	99,84	0,16
5	Persentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Hukum.	100 %	100 %	100 %	901.707.000	885.835.575	98,24	1,76

Berdasarkan tabel diatas disimpulkan bahwa dari anggaran Biro Hukum sebesar Rp. 4.220.707.000,- capaian realisasi anggaran atas pencapaian 5 (lima) indikator program pada tahun 2023 sebesar Rp.4.190.524.215,- (99,28%) dan terdapat efisiensi anggaran sebesar 0,72%.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja disampaikan melalui tabel berikut :

Tabel 3.7.
Analisis Program Dan Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja

No	Program	Indikator Kinerja Program	% Capaian	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
1.	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase rancangan produk hukum daerah yang dihasilkan	100	Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Harmonisasi	12 dokumen	Menunjang

No	Program	Indikator Kinerja Program	% Capaian	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
		sesuai kaidah pembentukan perundang-undangan			Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur		
				Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Harmonisasi Rancangan Keputusan Gubernur	12 dokumen	Menunjang
				Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan	Jumlah dokumen kajian produk hukum	12 dokumen	Menunjang
		Persentase rancangan produk hukum kabupaten/ kota yang dievaluasi atau difasilitasi.	100	Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dan Evaluasi Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/ Kota	12 dokumen	Menunjang
		Persentase Bantuan Hukum dan Sengketa Hukum yang tertangani	100	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Dokumen Penyelesaian Penanganan Perkara	12 dokumen	Menunjang
		Persentase kabupaten/ kota peduli HAM	100	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Dokumen Penyelesaian Sengketa Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	12 dokumen	Menunjang
2.	Administrasi Umum	Persentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Hukum	100	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Biro Hukum	2 laporan	Menunjang

Berdasarkan tabel diatas, bahwa Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum memiliki 5 (lima) indikator kinerja program, dengan didukung oleh 2 (dua) kegiatan antara lain:

a. Kegiatan Fasilitas Penyusunan Perundang-undangan.

Kegiatan ini merupakan penunjang Program Fasilitas dan Koordinasi Hukum pada indikator kinerja persentase rancangan produk hukum daerah yang dihasilkan sesuai kaidah pembentukan perundang-undangan, dengan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

Bahwa Kegiatan Fasilitas Penyusunan Perundang-undangan pada tahun 2023 telah berhasil menyusun 12 dokumen penyusunan dan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, serta didukung pula Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Pengaturan, Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Penetapan dan Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya.

Pada tahun 2023 telah dilakukan harmonisasi dan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah, antara lain :

Tabel 3.8.
Pengharmonisasian, Pembulatan, Dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023

No	Raperda	Urgensi	Keterangan
1	2	3	4
1	Pembentukan Produk Hukum Daerah	Dalam rangka: - pemantaban substansi raperda sebagai bahan pembahasan bersama dengan DPRD (Bapemperda / pemrakarsa). - penyampaian masukan/saran Biro Hukum ke DPRD atas Ranperda dimaksud.	Raperda dimaksud masuk dalam PROPEMPERDA Tahun 2023. Usulan DPRD pemrakarsa Bapemperda.
2	Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Dalam rangka: - pencermatan substansi dan proses formil, pengharmonisasian pembulatan dan pemantaban substansi raperda sebagai bahan pembahasan bersama DPRD. - menindaklanjuti usulan Pansus Ranperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.	Raperda dimaksud masuk dalam PROPEMPERDA Tahun 2023. Usulan Gubernur pemrakarsa Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah.
3	Rencana Tata Ruang dan Wilayah Provinsi Jawa Tengah	Dalam rangka: - pencermatan substansi dan proses formil, pengharmonisasian pembulatan	Raperda dimaksud masuk dalam PROPEMPERDA Tahun 2023.

No	Raperda	Urgensi	Keterangan
1	2	3	4
		dan pemantaban substansi raperda sebagai bahan pembahasan bersama DPRD. - menindaklanjuti usulan Pansus Ranperda tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Provinsi Jawa Tengah Daerah.	Usulan Gubernur pemrakarsa Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah.
4	Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah	Dalam rangka: - Menindaklanjuti Perintah Gubernur Sehubungan Dengan Penetapan Undang-Undang Tentang Provinsi Jawa Tengah Yang Mengubah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah. - Pengusulan Perubahan Raperda tentang Hari Jadi ke Propemperda.	Raperda dimaksud masuk dalam PROPEMPERDA Tahun 2023 Usulan Gubernur pemrakarsa Biro Perekonomian SETDA.
5	Tata Kelola Badan Usaha Milik Daerah	Dalam rangka: - pemantaban substansi raperda sebagai bahan pembahasan bersama dengan DPRD (Komisi C / pemrakarsa). - penyampaian masukan/saran Biro Hukum ke DPRD atas Ranperda dimaksud.	Raperda dimaksud masuk dalam PROPEMPERDA Tahun 2023. Usulan DPRD pemrakarsa Komisi C.
6	Penanganan Konflik Sosial	Dalam rangka: - pemantaban substansi raperda sebagai bahan pembahasan bersama dengan DPRD (Komisi A / pemrakarsa). - penyampaian masukan/saran Biro Hukum ke DPRD atas Ranperda dimaksud.	Raperda dimaksud masuk dalam PROPEMPERDA Tahun 2023. Usulan DPRD pemrakarsa Komisi A.
7	Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkredit Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah	Dalam rangka: - pencermatan substansi dan proses formil, pengharmonisasian pembulatan dan pemantaban substansi raperda sebagai bahan pembahasan bersama DPRD. - menindaklanjuti usulan Komisi C.	Raperda dimaksud masuk dalam PROPEMPERDA Tahun 2023. Usulan Gubernur pemrakarsa Biro Perekonomian SETDA Provinsi Jawa Tengah.
8	Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara Dan Pihak Ketiga	Dalam rangka: - pencermatan substansi dan proses formil, pengharmonisasian pembulatan dan pemantaban substansi raperda sebagai bahan pembahasan bersama DPRD. - menindaklanjuti usulan Komisi C.	Raperda dimaksud masuk dalam PROPEMPERDA Tahun 2023. Usulan Gubernur pemrakarsa Biro Perekonomian SETDA Provinsi Jawa Tengah.

No	Raperda	Urgensi	Keterangan
1	2	3	4
9	Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, Dan Batuan Di Provinsi Jawa Tengah	Dalam rangka: - pencermatan substansi dan proses formil, pengharmonisasian pembulatan dan pemantaban substansi raperda sebagai bahan pembahasan bersama DPRD - Penyampaian Raperda ke DPRD	Raperda dimaksud masuk dalam PROPEMPERDA Tahun 2023. Usulan Gubernur pemrakarsa Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah.
10	Kedaulatan Pangan	Dalam rangka: - pemantaban substansi raperda sebagai bahan pembahasan bersama dengan DPRD (Komisi B / pemrakarsa) - penyampaian masukan/saran Biro Hukum ke DPRD atas Ranperda dimaksud	Raperda dimaksud masuk dalam PROPEMPERDA Tahun 2023. Usulan DPRD pemrakarsa Komisi B.
11	Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum	Dalam rangka pemantaban substansi raperda sebagai bahan pembahasan bersama dengan DPRD (Komisi D / pemrakarsa)	Raperda dimaksud masuk dalam PROPEMPERDA Tahun 2023. Usulan DPRD pemrakarsa Komisi D.
12	Pengelolaan Keuangan Daerah	Dalam rangka pemantaban substansi raperda sebagai bahan pembahasan bersama dengan DPRD (Komisi C / pemrakarsa)	Raperda dimaksud masuk dalam PROPEMPERDA Tahun 2023. Usulan DPRD pemrakarsa Komisi C.
13	Penyelenggaraan Ketenagakerjaan	Dalam rangka: - Menindaklanjuti Hasil Fasilitasi Kementerian Dalam Negeri. - Finalisasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan Untuk Disetujui Bersama Dan Ditetapkan Menjadi Peraturan Daerah.	Raperda dimaksud masuk dalam PROPEMPERDA Tahun 2023. Usulan DPRD pemrakarsa Komisi E.
14	Pembahasan Terkait Usulan Raperda Prakarsa Bapemperda Tentang Pencabutan Peraturan Daerah	Dalam rangka memberikan saran dan masukan terkait perda jawa tengah yang perlu dicabut karena sudah disharmoni dengan peraturan perundang-undangan terbaru	Masih dalam tahap pengkajian oleh tim ahli bapemperda apakah akan diusulkan ke dalam propemperda
15	Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Dalam rangka: - Menindaklanjuti Hasil Fasilitasi Kementerian Dalam Negeri. - Finalisasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.	Raperda dimaksud masuk dalam PROPEMPERDA Tahun 2023. Usulan Gubernur pemrakarsa Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.

Pada Tahun 2023 juga telah ditetapkan 13 (tiga belas) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Tabel 3.9.
Daftar Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023

NO	NOMOR PERDA	TENTANG	TANGGAL DITETAPKAN	TANGGAL DIUNDANGKAN	NOMOR LD/TLD	KETERANGAN
1	No. 1 Th. 2023	Perlindungan Dan Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan Dan Pergaraman	18 Januari 2023	18 Januari 2023	LD 2023/ NO. 1, TLD NO. 144	
2	No. 2 Th. 2023	Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas	18 Januari 2023	18 Januari 2023	LD 2023/ NO. 2, TLD NO. 145	Mencabut Perda No. 11 Tahun 2014 tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
3	No. 3 Th. 2023	Tata Kelola Sistem Pemasaran Hasil Pertanian, Perikanan, dan Produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	18 Januari 2023	18 Januari 2023	LD 2023/ NO. 3, TLD NO. 146	
4	No. 4 Th. 2023	Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	24 Mei 2023	24 Mei 2023	LD 2023/ NO. 4, TLD NO. 147	Mencabut : 1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 20 tahun 2003 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air Lintas Kabupaten/Kot a di Provinsi Jawa Tengah. 2. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Limbah. 3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah

NO	NOMOR PERDA	TENTANG	TANGGAL DITETAPKAN	TANGGAL DIUNDANGKAN	NOMOR LD/TLD	KETERANGAN
						Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup di Provinsi Jawa tengah 4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah di Jawa Tengah
5	No. 5 Th. 2023	Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah	1 September 2023	1 September 2023	LD 2023/ NO. 5, TLD NO. 148	Mencabut Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2004 tentang Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah
6	No. 6 Th. 2023	Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022	4 September 2023	4 September 2023	LD 2023/ NO. 6	
7	No. 7 Th. 2023	Perubahan Bentuk Hukum PT. Sarana Pembangunan Jawa Tengah Menjadi PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah PERSERODA	23 Oktober 2023	23 Oktober 2023	LD 2023/ NO. 7, TLD NO. 159	Mencabut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pendirian PT. Sarana Pembangunan Jawa Tengah
8	No. 8 Th. 2023	Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah	23 Oktober 2023	23 Oktober 2023	LD 2023/ NO. 8, TLD NO. 150	
9	No. 9 Th. 2023	Perubahan Bentuk Hukum PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa	23 Oktober 2023	23 Oktober 2023	LD 2023/ NO. 9	Mencabut Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2014

NO	NOMOR PERDA	TENTANG	TANGGAL DITETAPKAN	TANGGAL DIUNDANGKAN	NOMOR LD/TLD	KETERANGAN
		Tengah Menjadi PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah PERSERODA				tentang Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah
10	No. 10 Th. 2023	Fasilitasi Dan Sinergitas Pengembangan Pesantren	23 Oktober 2023	23 Oktober 2023	LD 2023/ NO. 10	
11	No. 11 Th. 2023	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023	6 November 2023	6 November 2023	LD 2023/ NO. 11	
12	No. 12 Th. 2023	Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah	23 November 2023	23 November 2023	LD 2023/ NO. 12	Mencabut: Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah

NO	NOMOR PERDA	TENTANG	TANGGAL DITETAPKAN	TANGGAL DIUNDANGKAN	NOMOR LD/TLD	KETERANGAN
						Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah
13	No. 13 Th. 2023	Penyelenggaraan Ketenagakerjaan	29 Desember 2023	29 Desember 2023	LD 2023/ NO. 13	
14	No. 14 Th. 2023	Anggatan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	29 Desember 2023	29 Desember 2023	LD 2023/ NO. 14	

Tahun 2023 Biro Hukum telah melaksanakan pengharmonisan, pembulatan dan pematapan terhadap Rancangan Peraturan Gubernur, yaitu :

Tabel 3.10
Inventarisasi Pengharmonisasian, Pembulatan, Dan Pemantapan Konsep
Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Tahun 2023

NO	JUDUL RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR
1	Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah Di Provinsi Jawa Tengah
2	Perencanaan Pengawasan Tahun 2023
3	Rencana Aksi Keselamatan lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
4	Rencana Kontijensi Bencana Di Provinsi Jawa Tengah;
5	Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pembasan Progresif Pajak Kendaraan Bermotor dan Pembebasan Sanksi Administrasi PKB Bagi Masyarakat Jawa Tengah.
6	Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru SMA, SMK dan Sekolah Luar Biasa Provinsi Jawa Tengah
7	Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Provinsi
8	Tata Cara Pemanfaatan Tanah Dan Pemberian Rekomendasi Pada Tanah HPL Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Di Kawasan Pusat Rekreasi Dan Promosi Pembangunan (PRPP) Jawa Tengah
9	Pedoman Penyampaian Laporan Harta Kekayaan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
10	Pengelolaan Data Terpadu Jawa Tengah
11	Perubahan Tarif Rumah Sakit Di Jawa Tengah
12	Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah
13	Bantuan Jaminan Sosial Bagi Fakir Miskin Tidak Produktif Melalui Kartu Jawa Tengah Sejahtera
14	Sistem Kerja Dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Selain itu Biro Hukum pada tahun 2023 juga telah melakukan analisis, evaluasi dan pengkajian terhadap produk-produk hukum yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan jaman dan keadaan, dengan data hasil anev dan pengkajian sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.11.
Inventarisasi Analisis, Evaluasi dan Pengkajian Produk Hukum Tahun 2023

No.	Pengkajian
1	Pengkajian Analisis Dan Evaluasi Terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah
2	Pengkajian, Analisis Dan Evaluasi Terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2014
3	Pengkajian Penyusunan Peraturan Gubernur Tindak Lanjut Peraturan Daerah Yang Ditetapkan Pada Tahun 2018-2023
4	Pengkajian Analisis Dan Evaluasi Produk Hukum Daerah Sektor Pengelolaan Dan Penanganan Pengaduan Masyarakat
5	Pengkajian, Analisis Dan Evaluasi Pariwisata Provinsi Jawa Tengah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2021
6	Pengkajian Analisis Dan Evaluasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 Tentang Garis Sempadan
7	Pengkajian Analisis Dan Evaluasi Terhadap Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2016 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2020
8	Pengkajian Analisis Dan Evaluasi Produk Hukum Daerah Di Bidang Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit
9	Pengkajian Analisis Dan Evaluasi Produk Hukum Daerah Provinsi Jawa Tengah Sektor Sumber Daya Air
10	Pengkajian Analisis Dan Evaluasi Produk Hukum Daerah Provinsi Jawa Tengah Sektor Sumber Daya Air
11	Pengkajian Analisis Dan Evaluasi Produk Hukum Daerah Sektor Pengelolaan Dan Penanganan Pengaduan Masyarakat

Sedangkan Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan untuk menunjang indikator kinerja program persentase rancangan produk hukum kabupaten/kota yang dievaluasi atau difasilitasi, telah berhasil menyusun 12 dokumen fasilitasi dan evaluasi Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota.

Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perundang Undangan didukung melalui Sub Kegiatan Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota yaitu melakukan evaluasi dan fasilitasi terhadap rancangan produk hukum kabupaten/kota. Hal tersebut dikarenakan Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah melaksanakan peran perangkat Gubernur sebagai wakil Pemerintah pusat, dalam rangka pembinaan dan pengawasan Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, yang

diwujudkan dalam bentuk pengkajian, evaluasi dan fasilitasi rancangan produk hukum daerah Kabupaten/Kota yang meliputi Wilayah I, Wilayah II dan Wilayah III.

Tabel 3.12
Capaian Kinerja Sub Kegiatan Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum
Kabupaten/Kota

No.	Sub Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Pengawasan Produk Hukum Daerah Kabupaten/ Kota Wilayah I.	Fasilitasi dan evaluasi rancangan produk hukum daerah kabupaten/kota yang dikaji.	95 dokumen	120 dokumen	126 %
2.	Pengawasan Produk Hukum Daerah Kabupaten/ Kota Wilayah II.	Fasilitasi dan evaluasi rancangan produk hukum daerah kabupaten/kota yang dikaji.	100 dokumen	117 dokumen	123 %
3.	Pengawasan Produk Hukum Daerah Kabupaten/ Kota Wilayah III.	Fasilitasi dan evaluasi rancangan produk hukum daerah kabupaten/kota yang dikaji.	100 dokumen	116 dokumen	122 %

b. Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum.

Kegiatan ini merupakan kegiatan penunjang indikator kinerja program persentase Bantuan Hukum dan Sengketa Hukum yang tertangani.

Fasilitasi penanganan perkara di lembaga peradilan, fasilitasi penanganan perkara di Pemerintah Kabupaten/Kota dan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin bertujuan :

1. Agar permasalahan hukum secara litigasi dan/atau non litigasi bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Aparatur Sipil Negara (ASN) Provinsi Jawa Tengah dapat terselesaikan.
2. Supaya terwujud sinkronisasi dalam penyelesaian permasalahan hukum secara litigasi bagi Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah.
3. Supaya terpenuhi perlindungan hukum bagi masyarakat miskin.

Pada indikator program ini dilaksanakan melalui Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum dengan dukungan Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum :

- a) Pelaksanaan fasilitasi penanganan perkara dari target sebanyak 11 perkara dan telah difasilitasi penanganannya sejumlah 19 perkara.

Tabel 3.13.
Fasilitasi Penangan Perkara oleh Biro Hukum Tahun 2023

BULAN	PERDATA	TUN	AJUDIKASI INFORMASI
JANUARI	105/Pdt.G/2022/PN.Smg Terkait dengan perbuatan Melawan Hukum Gubernur Jawa Tengah dengan masyarakat terkait asset UNDIP. (Tingkat Banding) 106/Pdt.G/2022/PN.Smg Terkait dengan perbuatan Melawan Hukum Gubernur Jawa Tengah dengan masyarakat terkait asset UNDIP. (Tingkat Banding) 63/Pdt.G/2022/PN.Pwd Terkait Perbuatan Melawan Hukum yaitu PAW anggota DPRD Purwodadi kepada Gubernur Jawa Tengah (Gugatan di cabut)	86/TF/G/2022/PTUN.SMG Terkait tindakan faktual Gubernur tidak melaksanakan putusan Pengadilan (tingkat banding). 39/G/2022/PTUN.SMG Terkait dengan pemutusan kontrak antara Kepala Bidang Pelaksanaan Jalan Wilayah Timur Dinas PUBINMARCK (Kasasi).	
PEBRUARI		9/G/2023/PTUN.SMG Terkait dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). (Tingkat Kasasi)	
MARET	-	28/TF/G/2023/PTUN.SMG Terkait tindakan faktual yaitu PAW anggota DPRD Kabupaten Kudus kepada Gubernur Jawa Tengah. (dikeluarkan dari Pihak)	

MEI	• 23/Pdt.U/2023/PN.Smg Jo. 105/2022/PN.Smg terkait Perbuatan Melawan Hukum antara Gubernur Tengah Rudi Waskito. (Banding) • 20/Pdt.U/2023/PN.Smg Jo. 106/2022/PN.Smg terkait Perbuatan Melawan Hukum antara Gubernur Tengah Rudi Waskito. (Banding)		• 088/SI/V/2023 Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah terkait dengan Informasi Wadas. (PUTUSAN)
JUNI	• 238/Pdt.G/2023/PN.Smg Terkait dengan Perbuatan melawan Hukum antara RSUD Tugurejo dengan PT. Sinar Intan. (PUTUSAN). • 205/Pdt.G/2022/PN. Smg terkait Pengangkatan Sita Eksekusi Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah. (SUDAH DIANGKAT SITA)		• 021/SI/VI/2023 Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah terkait Informasi Aduan Pencemaran Nama Baik.(PUTUSAN)
AGUSTUS	• 7/Pdt.Bth/2023/PN.Rbg Terkait dengan Perlawanan terhadap lelang Hak Tanggung. (GUGATAN DICABUT)		• 029/SI/VII/2023 Komisi Informasi Provinsi Jawa tengah terkait Informasi Realisasi penggunaan Anggaran 2021 untuk biaya perawatan covid 19.(GUGATAN DICABUT)
OKTOBER	• 113/Pdt.G/2023/PN.Kln Terkait dengan Perbuatan Melawan Hukum gantirugi lahan terdampak pembangunan jalan Tol Solo-Jogja.- (dalam proses persidangan)	• 76/G/2023/PTUN.SMG Terkait Pergantian antar waktu anggota DPRD Kota Salatiga an Muh Nurhidayat (dalam proses persidangan)	
NOVEMBER	• 235/Pdt.G/2023/PN.Smn Terkait dengan Perbuatan Melawan Hukum pengadaan tanah Bendungan Bener		• 097/SI/XI/2023 Sengketa Permohonan informasi Perda RTRW Prov. Jateng oleh PATTIRO (dalam proses persidangan)

- b) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat miskin untuk memperoleh pemerataan keadilan, maka Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah melakukan langkah-langkah melalui fasilitasi pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin yang sedang berperkara di lembaga peradilan yang bekerjasama dengan 22 (dua puluh dua) Lembaga Bantuan Hukum (LBH) di Provinsi Jawa Tengah. Pada Tahun 2023 telah ditangani 200 perkara yang terdiri dari 51 perkara pidana, 74 perkara perdata dan 75 perkara non litigasi.

Tabel 3.14.
Daftar Penanganan Perkara Oleh LBH di Jawa Tengah Yang Bekerjasama Dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023

NO	NAMA LBH	PIDANA	PERDATA	NON LITIGASI	JUMLAH
1	Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum (LKBH) Fakultas Syariah Dan Hukum (FSH) Universitas Sains Al-Qur'an (UNSIQ).	7	-	4	11
2	Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.	9	-	-	9
3	Lembaga Bantuan Hukum Temanggung.	-	6	-	6
4	Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Banjarnegara.	1	3	9	13
5	Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum (PLBH) Perisai Kebenaran Purwokerto.	5	4	-	9
6	Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Wahana Cilacap.	6	-	4	10
7	Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum Pendowo Solotigo.	1	-	9	10
8	Yayasan Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (PAHAM) Jawa Tengah.	3	4	2	9

NO	NAMA LBH	PIDANA	PERDATA	NON LITIGASI	JUMLAH
9	Majelis Hukum Dan Hak Asasi Manusia Pimpinan Wilayah Aisyiyah Jawa Tengah.	-	2	7	9
10	Lembaga Bantuan Hukum Ratu Adil.	9	-	2	11
11	Lembaga Bantuan Hukum Wongsonegoro Semarang.	-	-	-	0
12	Lembaga Bantuan Hukum Kamilia.	-	1	8	9
13	Lembaga Bantuan Hukum Surya Kusuma.	-	9	-	9
14	Lembaga Pemberdayaan Perempuan Sekar Jepara (LPP Sekar Jepara).	5	-	5	10
15	Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Abdul Ghofur and Patners.	-	9	-	9
16	Yayasan Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) Kabupaten Kudus.	-	2	8	10
17	Lembaga Bantuan Hukum Kudus.	4	-	5	9
18	Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Satria Tegowanu.	-	9	-	9
19	Lembaga Bantuan Hukum Purwa Justicia.	-	9	-	9
20	Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Sultan Ageng.	-	3	6	9
21	Perkumpulan Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum Sakti Purworejo.	-	9	4	13
22	Perkumpulan Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum (LKBH) Jepara.	-	2	5	7
	TOTAL	50	72	78	200

Catatan :

Terdapat 1 LBH selama tahun 2023 yang tidak melakukan penanganan perkara bagi masyarakat miskin.

Selain Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum juga sebagai penunjang indikator kinerja program Persentase Kabupaten/Kota Peduli HAM.

Kegiatan Fasilitas Bantuan Hukum dilaksanakan melalui dukungan Sub Kegiatan Fasilitas Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM.

Pada tahun 2023 Biro Hukum telah melakukan fasilitas penanganan sengketa aset, pelayanan aduan masyarakat terkait permasalahan di bidang hukum dan HAM, dan melakukan pembinaan aksi peduli HAM kepada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se- Jawa Tengah.

Tabel 3.15.
Fasilitas Penanganan Sengketa Aset Tahun 2023

NO	NAMA OPD	LOKASI	SENGKETA
1	RSUD Dr. Moewardi	Surakarta	PKL Liar
2	Disdik_Elang _Pagar	Semarang	Pagar Pembatas
3	Dinas Sosial	Purworejo	Pemkab Purworejo
4	Disdik Validasi Tanah	Semarang	Validasi Tanah
5	DISTANBUN	BATANG	SENGKETA TANAH
6	DISPORAPAR	KARIMUNJAWA	SENGKETA TANAH
7	DINLUTKAN	PEMALANG	P3D
8	Disporapar	Karimunjawa	Sengekta Tanah
9	Disdik _Validasi Tanah	Semarang	Validasi Tanah
10	ASET PEMPROV TUJT	SEMARANG	Aset BUMD Pemprov
11	Aset DISTANBUN _Coconesia	Batang	Pemanfaatan Aset

Pada tahun 2023, Biro Hukum telah melakukan fasilitas terhadap aduan permasalahan hukum yang dihadapi masyarakat sejumlah 72 aduan (data terlampir). Selain itu juga telah melakukan penilaian terkait Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia (KKP-HAM) kepada 35 kabupaten/kota (data terlampir)

- c. Selanjutnya Program Administrasi Umum dengan indikator kinerja program Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Hukum yang merupakan indikator penunjang indikator kinerja program utama yang ada di Biro Hukum, didukung oleh Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang pelaksanaannya didukung oleh Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan yang sumber dananya berasal dari Anggaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau

(DBHCHT). Pelaksanaan kegiatannya terfokus pada sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang cukai, diantaranya adalah :

- Sosialisasi pemberantasan cukai ilegal melalui pembuatan dan pemasangan iklan videotron, penyebarluasan iklan banner, spanduk, leaflet yang bertema "GEMPUR CUKAI ILEGAL".
- Sosialisasi Pemberantasan Cukai Ilegal kepada masyarakat bekerjasama dengan Universitas Negeri Semarang (UNNES) melalui kegiatan KKN Tematik Mahasiswa Universitas Negeri Semarang (UNNES) yang berlokasi di Kabupaten Tegal dan Kabupaten Klaten.
- Sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang cukai melalui talkshow di radio.

Sedangkan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang didukung oleh Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dan Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD merupakan kegiatan penunjang tugas pokok dan fungsi Biro Hukum berupa kegiatan penyelenggaraan administrasi keuangan dan umum, kegiatan survey peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat atas pelayanan Biro Hukum, serta kegiatan koordinasi dan konsultasi kepada Lembaga Pemerintah Pusat dan Lembaga Teknis lainnya dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Hukum.

3.2 REALISASI ANGGARAN

Biro Hukum Provinsi Jawa Tengah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya pada awal Tahun 2023 didukung dengan anggaran sebesar Rp. 3.785.707.000,- yang kemudian pada APBD Perubahan menjadi Rp. 4.220.707.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 4.190.524.215,- (99,28%). Rincian penggunaan anggaran pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.16.
Capaian Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2023

NO	Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %
1	Program Fasilitas dan Koordinasi Hukum	3.319.000.000	3.304.688.640	99,57
	a. Kegiatan Fasilitas Penyusunan Perundang-undangan	1.969.000.000	1.957.569.980	99,42
	b. Kegiatan Fasilitas Bantuan Hukum	1.350.000.000	1.347.118.660	99,79
2	Program Administrasi Umum	881.707.000	872.818.000	98,99
	a. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	650.000.000	641.752.175	98,73
	b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	251.707.000	244.083.400	96,97

3.3 INOVASI

Biro Hukum pada tahun 2023 telah melakukan beberapa inovasi sebagai salah satu langkah untuk meningkatkan layanan dan peran serta kepada masyarakat, aparatur pemerintah dan lembaga pemerintah, antara lain :

- a. Pengembangan Website Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Provinsi Jawa Tengah menjadi pusat layanan hukum yang terpadu dalam satu pintu untuk memudahkan masyarakat dan aparatur pemerintah dalam mengakses layanan bidang hukum.
- b. Pembuatan *New Branding* (Logo Baru) JDIH Provinsi Jawa Tengah dan menciptakan *tagline* "Ngayemi Lan Nglayani" yang bertujuan agar masyarakat, aparatur pemerintah dan lembaga lain semakin merasakan kemudahan dan kenyamanan atas layanan yang diberikan oleh Biro Hukum.
- c. Membangun "Satu Data Produk Hukum Daerah Provinsi Jawa Tengah" sebagai upaya membantu kepada semua pihak dalam membutuhkan informasi produk-produk hukum Pemerintah Provinsi Jawa Tengah agar semakin cepat, mudah, efektif dan efisien.

- d. Membuat New Branding dan pengembangan aplikasi semula bernama SIP-PROKUMDA menjadi WASKITO Jateng bertujuan agar pelaksanaan fasilitasi, evaluasi dan pengkajian produk hukum daerah kabupaten/kota semakin efektif, cepat dan efisien.

3.4 PENGHARGAAN

Sebagai wujud kinerja nyata pelaksanaan tugas dan fungsi dalam Urusan-Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan, Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 12 Oktober 2023 pada Pertemuan Nasional Pengelola JDIHN dan Legal Development Content Creator (LDCC) Awards Tahun 2023 dengan tema “Membangun Hukum Nasional sebagai Perikat dan Pemersatu Bangsa melalui Transformasi Digital” di Jakarta berhasil sukses meraih **“TERBAIK KE-1 SEBAGAI PENGELOLA JDIH TERBAIK KATEGORI PROVINSI”** setelah 3 tahun berturut-turut menjadi terbaik ke-2. Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Menteri Hukum dan HAM kepada Pj. Gubernur Jawa Tengah. Penghargaan diperoleh dikarenakan peningkatan kualitas Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum sesuai standar pengelolaan yang telah ditetapkan serta rutin membina anggota JDIH Provinsi Jawa Tengah di Daerah.

Hasil tersebut terbukti bahwa sejumlah Anggota JDIH Provinsi Jawa Tengah juga meraih penghargaan, diantaranya Kab. Batang Terbaik ke-2, Kab. Semarang Terbaik ke-3, Kab. Wonosobo Terbaik ke-4, Kab. Magelang Terbaik ke-5, Kab. Sukoharjo Terbaik ke-7 dan Kab. Demak Terbaik ke-10 kategori pengelola Kabupaten Terbaik. Kemudian pada kategori pengelola Kota Terbaik ada Kota Tegal yang meraih Terbaik ke-5. Selain itu pada kategori Sekretariat DPRD Provinsi, Jawa Tengah meraih terbaik Ke-2 dan pada kategori Sekretariat DPRD Kabupaten, Kab. Batang dan Kab. Sukoharjo meraih terbaik ke-2 dan terbaik ke-3. Tak hanya itu, pada kategori Perguruan Tinggi, Universitas Tidar Magelang pun meraih Terbaik ke-1 tingkat Nasional dalam mengelola JDIH.

Gambar 3.1.
Penerimaan Penghargaan Terbaik I JDIH Awards Tahun 2023



Gambar 3.2.
Piala dan Piagam Penghargaan Terbaik I JDIH Tahun 2023



Pada puncak acara puncak Peringatan Hari HAM Sedunia Ke-75 dengan tema "Harmoni Dalam Keberagaman" di Jakarta tanggal 10 Desember 2023 melalui Pj. Gubernur Jawa Tengah didampingi Kepala Biro Hukum menerima penghargaan sebagai **"PROVINSI TERBAIK PEMBINA KABUPATEN/KOTA PEDULI HAM"** yang diserahkan langsung oleh Menteri Hukum dan HAM. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah merupakan satu-satunya Provinsi dengan jumlah Kabupaten/Kota terbanyak yang mendapatkan Penghargaan Kabupaten/Kota Peduli HAM.

Terdapat 34 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah yang dianugerahi Penghargaan Kabupaten/Kota Peduli HAM. Kabupaten/Kota tersebut adalah Kab. Banjarnegara, Kab. Banyumas, Kab. Batang, Kab. Blora, Kab. Boyolali, Kab. Brebes, Kab. Cilacap, Kab. Demak, Kab. Grobogan, Kab. Jepara, Kab. Kebumen, Kab. Karanganyar, Kab. Kendal, Kab. Klaten, Kab. Kudus, Kab. Pati, Kab. Pekalongan, Kab. Pemalang, Kab. Purbalingga, Kab. Purworejo, Kab. Rembang, Kab. Semarang, Kab. Sragen, Kab. Sukoharjo, Kab. Tegal, Kab. Temanggung, Kab. Wonogiri, Kab. Wonosobo, Kota Magelang, Kota Pekalongan, Kota Salatiga, Kota Semarang, Kota Surakarta dan Kota Tegal. Tentu saja penghargaan ini didapat atas kerjasama dari berbagai pihak, salah satunya kerjasama

antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah yang telah bersinergi dengan berbagai upaya untuk membina Kabupaten/Kota Peduli HAM baik dalam kegiatan rapat koordinasi maupun fasilitasi langsung ke daerah sesuai amanat Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 22 Tahun 2021 tentang Kriteria Kabupaten/Kota Peduli HAM.

Gambar 3.3.
Penerimaan Penghargaan Pembina
Kabupaten/Kota Peduli HAM Tahun 2023



Penghargaan-penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi atas peran dan komitmen bersama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam Penghormatan, Pemajuan, Pemenuhan, Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia (P5HAM).

Selanjutnya komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam P5HAM juga telah tertuang dalam RPJMD 2018-2023 dan direalisasikan dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di bawah koordinasi Sekretaris Daerah cq. Kepala Biro Hukum, dan di tingkat Kabupaten/Kota melalui evaluasi dan pemantauan serta dilaporkan ke Kementerian Hukum

dan HAM setiap periode B04, B08 dan B12 dan pembinaan di tingkat provinsi akan dilanjutkan dengan penunjukan UPT Pelayanan Publik berbasis HAM sebagai percontohan bagi unit pelayanan publik lainnya. Di level kabupaten kota akan ditingkatkan pemantauan koordinasi pelaksanaan P5HAM.

BAB IV PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil capaian kinerja dan pengukuran kinerja sebagaimana telah diuraikan pada Bab III, dapat disimpulkan bahwa kinerja Biro Hukum pada tahun anggaran 2023 telah terlaksana sesuai target yaitu capaian sebesar 100% dengan kategori "**Baik**".

Tugas pokok dan fungsi Biro Hukum dilaksanakan melalui 2 (dua) Program yaitu **Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum** dengan alokasi anggaran Rp.3.319.000.000,- dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.3.304.688.640,- (99,57%). Program ini terdistribusi ke dalam 4 Indikator Kinerja Program yang semuanya dengan tingkat capaian tinggi yaitu persentase rancangan produk hukum daerah yang dihasilkan sesuai kaidah pembentukan perundang undangan dengan realisasi 100% telah sesuai target; persentase rancangan produk hukum kabupaten/kota yang dievaluasi atau difasilitasi dengan realisasi 100% sesuai target; persentase bantuan hukum dan sengketa hukum yang tertangani dengan realisasi 100% telah sesuai target; persentase kabupaten/kota peduli HAM dengan realisasi 104% melebihi dari target 96%. Sedangkan **Program Administrasi Umum** sebagai program pendukung dengan alokasi anggaran Rp.901.707.000,- dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.885.835.575,- (98,24%).

Pencapaian sesuai target yang diharapkan karena pelaksanaan koordinasi, konsultasi serta fasilitasi antara Biro Hukum dengan Pemerintah Pusat, Perangkat Daerah terkait serta Pemerintah Kabupaten/Kota berjalan dengan baik. Selain itu keberadaan aplikasi layanan yang dimiliki Biro Hukum seperti E-PHD Provinsi Jawa Tengah, Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Provinsi Jawa Tengah, Aplikasi Waskito Jateng, Aplikasi Rencana Aksi HAM (RANHAM), Aplikasi Layanan Bantuan Hukum (Bantuan Hukum Online) serta Pelita Jateng mempermudah pelaksanaan evaluasi, fasilitasi, pengkajian, penyusunan rancangan produk hukum daerah provinsi dan kabupaten/kota, pendokumentasian dan penginformasian produk hukum

lebih efektif dan efisien, serta layanan bantuan hukum dan pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan, Pemenuhan, Penegakan dan Pemajuan Hak Asasi Manusia (P5HAM).

Disamping itu adanya beberapa keberhasilan dalam mendapatkan prestasi dan menciptakan inovasi-inovasi baru yang dapat menunjang tugas pokok dan fungsi Biro Hukum, diantaranya :

1. Memperoleh penghargaan sebagai Provinsi Terbaik Pembina Kabupaten/Kota Peduli HAM Tahun 2023.
2. Memperoleh penghargaan sebagai Anggota Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Nasional Terbaik I Tahun 2023 Kategori Provinsi.
3. Inovasi pengembangan aplikasi Elektronik Produk Hukum Daerah (e-PHD) semakin mempermudah dan mempercepat dalam melakukan proses penyusunan produk-produk hukum daerah dan melakukan pengintegrasian dengan Aplikasi Tata Praja.
4. Pengembangan website Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Biro Hukum (<https://jdih.jatengprov.go.id>) pusat layanan hukum terpadu dalam satu pintu.
5. Membangun Data Center Produk Hukum Daerah Provinsi Jawa Tengah.
6. Membangun aplikasi Layanan Bantuan Hukum (Bantuan Hukum Online) untuk mempermudah proses layanan bantuan hukum melalui kerjasama antara Lembaga Bantuan Hukum di Jawa Tengah dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada masyarakat miskin secara gratis di Jawa Tengah dalam kasus pidana dan perdata yang sedang beracara di Lembaga Peradilan maupun kasus Non Litigasi agar terwujud adanya pemerataan dalam memperoleh perlindungan hukum dan keadilan.
7. Inovasi pengembangan dan *new branding* aplikasi SIP-PROKUMDA menjadi WASKITO Jateng sebagai upaya peningkatan kinerja dalam melakukan fasilitasi, evaluasi dan pengkajian terhadap produk-produk hukum daerah kabupaten/kota.

4.2. REKOMENDASI

1. Perlunya peningkatan kualitas SDM pada Biro Hukum khususnya terhadap Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Analis Hukum, sehingga diperlukan untuk mengikuti pelatihan-pelatihan teknis yang dapat mendukung kinerja, tugas pokok dan fungsi Biro Hukum.
2. Pemberian bantuan hukum secara gratis kepada masyarakat miskin dan kelompok rentan lainnya di Jawa Tengah yang sedang menghadapi permasalahan hukum belum merata.



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pahlawan No. 9 Telp. 8311174 (20 Saluran) Fax. 8311266
Semarang – 50243

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : IWANUDDIN ISKANDAR, SH, M.Hum
Jabatan : Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah

selanjutnya disebut pihak pertama.

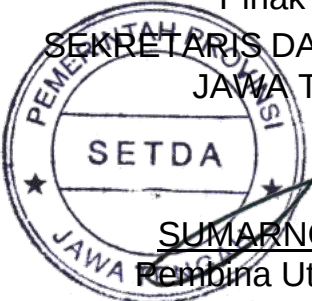
Nama : SUMARNO, SE, MM
Jabatan : Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, 9 Januari 2023

Pihak Kedua
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH

SUMARNO, SE, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19700514 199202 1 001

Pihak Pertama
KEPALA BIRO HUKUM

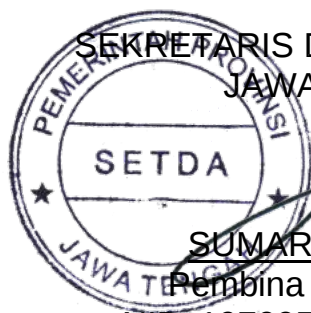
IWANUDDIN ISKANDAR, SH, M.Hum
Pembina Utama Muda
NIP. 19711207 199503 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BIRO HUKUM SETDA PROVINSI JAWA TENGAH

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan kualitas kebijakan produk hukum daerah.	Persentase rancangan produk hukum daerah yang dihasilkan sesuai kaidah pembentukan perundang-undangan.	100%
2.	Meningkatkan kualitas pengawasan produk hukum daerah kabupaten/kota.	Persentase rancangan produk hukum kabupaten/kota yang dievaluasi atau difasilitasi.	100%
3.	Meningkatkan kualitas pelaksanaan kebijakan di bidang hukum dan HAM.	1. Persentase bantuan hukum dan sengketa hukum yang tertangani.	100%
		2. Persentase kabupaten/kota peduli HAM.	96%
4.	Meningkatkan kualitas administrasi umum Biro Hukum.	Persentase capaian administrasi umum dan keuangan Biro Hukum.	100%

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Fasilitas Dan Koordinasi Hukum	Rp. 3.184.000.000,-	Sumber Anggaran dari APBD 100%
2. Program Administrasi Umum	Rp. 601.707.000,-	Sumber Anggaran dari APBD 100%

Semarang, 9 Januari 2023



SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH

SUMARNO, SE, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19700514 199202 1 001

KEPALA BIRO HUKUM

IWANUDDIN ISKANDAR, SH, M.Hum
Pembina Utama Muda
NIP. 19711207 199503 1 003



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pahlawan No. 9 Telp. 8311174 (20 Saluran) Fax. 8311266
Semarang – 50243

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : IWANUDDIN ISKANDAR, SH, M.Hum.
Jabatan : Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah

selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : SUMARNO, SE, MM.
Jabatan : Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, 13 November 2023

Pihak Kedua
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH

SUMARNO, SE, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19700514 199202 1 001

Pihak Pertama
KEPALA BIRO HUKUM

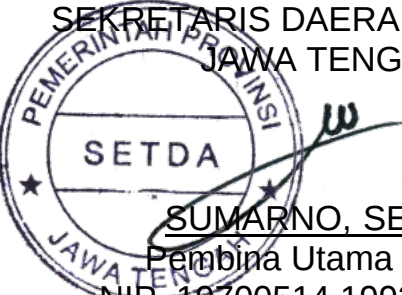
IWANUDDIN ISKANDAR, SH, M.Hum
Pembina Utama Muda
NIP. 19711207 199503 1 003

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
BIRO HUKUM SETDA PROVINSI JAWA TENGAH

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan kualitas kebijakan produk hukum daerah.	Persentase rancangan produk hukum daerah yang dihasilkan sesuai kaidah pembentukan perundang-undangan.	100%
2.	Meningkatkan kualitas pengawasan produk hukum daerah kabupaten/kota.	Persentase rancangan produk hukum kabupaten/kota yang dievaluasi atau difasilitasi.	100%
3.	Meningkatkan kualitas pelaksanaan kebijakan di bidang hukum dan HAM.	1. Persentase bantuan hukum dan sengketa hukum yang tertangani.	100%
		2. Persentase kabupaten/kota peduli HAM.	96%
4.	Meningkatkan kualitas administrasi umum Biro Hukum.	Persentase capaian administrasi umum dan keuangan Biro Hukum.	100%

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Fasilitas Dan Koordinasi Hukum	Rp. 3.319.000.000,-	Sumber Anggaran dari APBD 100%
2. Program Administrasi Umum	Rp. 901.707.000,-	Sumber Anggaran dari APBD 100%

Semarang, 13 November 2023


 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
 JAWA TENGAH
SUMARNO, SE, MM
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19700514 199202 1 001

KEPALA BIRO HUKUM

IWANUDDIN ISKANDAR, SH, M.Hum
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19711207 199503 1 003

Total Tercatat : 72 (Tujuh Puluh Dua) Aduan Masyarakat

Periode : Tahun 2023

No.	Tanggal Masuk Surat Pengaduan ke Biro Hukum	Tanggal Surat Pengaduan	Nama/Pihak Pelapor	Pihak Terlapor	Isi Aduan	Keinginan Pelapor	Kategori Aduan	Keterangan
1	05/01/2023	27/12/2022	Rondhi (Peltu Marinir)	Pemerintah, Masyarakat, Lurah	Penyerobotan tanah milik pengadu oleh pihak lain dengan alasan akan dibangun jalan umum.	Agar ditindaklanjuti aduan tersebut.	Pertanahan/Perumahan	- Cari kontak lurah - akan konfirmasi ke Pengadu dulu
2	17/11/2022	27/09/2022	Anik Istiqimatun	Masyarakat	Penipuan oleh orang lain, sudah dirugikan secara materil dan immateril.	Aduan di proses dan ditindaklanjuti.	Hukum/Peradilan dan Hak Asasi Manusia, Pidana/Penipuan	- masih menelusuri kontak Pengadu - sudah membuat tanggapan dan dinaikan pak mul
3	22/11/2022	03/11/2022	Aty Marjianti	Masyarakat	Sengketa kepemilikan tanah antara Pengadu dengan pihak pemenang lelang. Pengadu kalah di pengadilan, PK ditolak.	meminta bantuan atas persoalan tersebut.	Pertanahan/Perumahan	- sudah ada putusan MA, PK pengadu ditolak - sudah ada tanggapan kirim tgl 4 April 2023
4	27/12/2022	12/12/2022	Aloysius Rudijat	Pemerintah, Setda Temanggung	Proses rekomendasi validasi penetapan BPHT atas tanah untuk Gereja/Pertapaan yang belum dikeluarkan oleh Setda	Agar proses rekomendasi dilakukan dan dapat mengurus pembayaran Bea	Pertanahan/Perumahan	- sudah ada undangan aduan tanggal Rabu 4 Januari 2023
5	27/12/2022	24/11/2022	Heri Nugroho	Masyarakat	Terkait penipuan jual beli tanah	agar mafia tanah diusut tuntas	Pertanahan/Perumahan, penipuan	- scan ada, - sudah ditanggapi, Teradu sedang proses di POLDA Jateng - bukti kirim sudah scan
6	02/12/2022	10/11/2022	Sulistiyorini	Badan Hukum, Bank Tabungan Negara	mengenai kredit rumah di Bank, mengurus sertifikat rumah di Bank	meminta hak-hak dikembalikan	Pertanahan/Perumahan	- sudah ada scan, ada konsep tanggapan - tanggapan sudah terkirim (1 Maret 2023) diteruskan ke Bank BTN dan BWS
7	29/11/2022	02/11/2022	ST Nurhidayah	Bank/Koperasi/Lembaga Pinjaman	Kesulitan pembayaran kredit ke Bank/lembaga pinjaman karena terkena musibah	Meminta menyurati bank agar mendapat keringan bunga dan waktu pembayaran	Umum	- sudah terkitim tanggapan - diteruskan ke bank terkait

Total Tercatat	: 72 (Tujuh Puluh Dua) Aduan Masyarakat
Periode	: Tahun 2023

No.	Tanggal Masuk Surat Pengaduan ke Biro Hukum	Tanggal Surat Pengaduan	Nama/Pihak Pelapor	Pihak Terlapor	Isi Aduan	Keinginan Pelapor	Kategori Aduan	Keterangan
8	19/12/2022	14/12/2022	Paguyuban Masyarakat Dukuh Turus	Masyarakat, Penambang Ilegal Galian C	Menolak tambang ilegal galian C, karena mengganggu dan merusak lingkungan sekitar Desa tanjungrejo, Jekula, Kab. Kudus	agar tambang ilegal ditindaklanjuti	Lingkungan Hidup	- sudah di TL, ada rapat, dan akan di TL ke APH setempat
9	08/02/2023	08/02/2023	R Liese Anggraini	Masyarakat	Adanya KDRT yang dialami anaknya ARB oleh suaminya AT	Memohon keadilan dan perlindungan terhadap permasalahan yang sedang dihadapi.	Kdrt	- sudah kontak P dan akan menindaklanjuti dengan perdalam informasi serta menghubungkan dengan UPT Kota Semarang / Pendamping Hukum
10	08/02/2023	07/02/2023	Tarwiyah	Masyarakat	Adanya dugaan kekerasan seksual pada kedua anaknya yang dilakukan oleh ayah dan tetangga.	Ingin ada proses hukum.	tindak pidana kekerasan pada anak	- sudah masuk ke DP3A dan SPT Provinsi, sudah pernah difasilitasi UPT di Cilacap - sudah ada rapat kordinasi kamsis 16 Februari dengan stakeholder terkait termasuk kepolisian - sudah berkordinasi dengan SPT agar biro hukum dilibatkan untuk proses penanganan kasus tersebut - ada aduan muncul lagi di Twitter (Bulan Juni) - Sudah mendapat update dari dp3a dan SPT namun perlu kordinasi lanjutan
11	10/03/2023	20/02/2023	LSM Semut Merah	Badan Hukum, Toko Modern/Toko Retail	Kehadiran toko modern dianggap mematikan toko tradisional/pasar tradisional.	menolak dibangunnya toko modern tersebut.	Perdata umum	- Tanggapan proses naik
12	27/01/2023	12/01/2023	Yanti Binti Sumali	Masyarakat	Tanah Pengadu dikuasai oleh orang atas nama Sumardiyanto yang membeli tanah dari seseorang bernama R. Dono Istiawan.	membantu penyelesaian masalah tersebut, sudah dilaporkan ke Polda Jateng.	Pertanahan/Perumahan	
13	13/03/2023	16/02/2023	LPKNI Kab. Klaten	Pemerintah	Somasi 1 kepada Gubernur Jawa Tengah diduga terlibat pembunuhan terencana dengan UU Karantina dan UU keuangan corona kepada 1 juta rakyat indonesia dengan covid 19 sebagai pelaksana pembunuhan terencana ditingkat wilayah gubernur.	Meminta pertanggungjawaban.	Hukum/Peradilan dan Hak Asasi Manusia	

Total Tercatat : 72 (Tujuh Puluh Dua) Aduan Masyarakat

Periode : Tahun 2023

No.	Tanggal Masuk Surat Pengaduan ke Biro Hukum	Tanggal Surat Pengaduan	Nama/Pihak Pelapor	Pihak Terlapor	Isi Aduan	Keinginan Pelapor	Kategori Aduan	Keterangan
14	30/03/2023	30/03/2023	Masyarakat	Masyarakat	Dilaporkan karena memakai lahan fasum perumahan untuk angkringan (pedagang kaki lima), karena ada warga yang keberatan lahan tersebut digunakan untuk PKL.	Membantu menyelesaikan fasum di Perumahan Korpri Prov Jateng Kel. Sambiroto RW VIII	Pertanahan/Perumahan	Scan ada di ichsan - Klarifikasi dulu ke Satpol PP Kota Semarang karena sudah disidik oleh PPNS Satpol PP Kota Smg - Pengadu sudah difasilitasi tanggal 6 Juni 2023, hasilnya menunggu para pihak bersedia mediasi - belum ada surat permohonan mediasi resmi dari pihak teradu
15	10/03/2023	21/02/2023	Sutarno	Pemerintah, Pemerintah Desa Sawangan, Gringsing, Batang	Pemerintah Desa dianggap menyerobot tanah ahli waris pengganti Mardjojo Djamin bin Mangunjoyo	Membantu permasalahan supaya tidak berkepanjangan	Pertanahan/Perumahan	- Klarifikasi dulu ke pihak desa, karena sudah ada peralihan ke Aset Desa - Sudah kontak Pak Lurah Sawangan Gringsing, ternyata sudah pernah di klarifikasi tahun 2020 di Setda dan ada ro hukum juga (mas bayu), intinya aduan sudah ada putusan inkracht, sudah ada hasil fasilitasi yaitu silakan pengadu upaya hukum PK, atau membuat perjanjian/akta setara putusan, pemdes akan mematuhi putusan hukum - Lurah akan mengirimkan berkas ke biro hukum sebagai pelengkap
16	19/06/2023	25/05/2023	Djumadi	informasi belum lengkap	Sertifikat tanah dijual tanpa sepengetahuan Pengadu.	Meminta penyelesaian masalah tersebut.	Pertanahan/Perumahan	- perlu klarifikasi kronologi - dapat meminta fasilitasi ke daerah setempat (camat/lurah atau kota) atau ke instansi terkait.
17	19/06/2023	31/05/2023	Ibnu Rizal Dkk	Masyarakat	Sengketa hak atas tanah, ada klaim kepemilikan.	Perlindungan hukum, perlakuan adil dan meminta tanggapan.	Pertanahan/Perumahan	- masalah perdata tanah
18	19/06/2023	03/05/2023	H. Suwono	Pejabat (atau bertindak secara individual perlu klarifikasi)	Permasalahan kepengurusan yayasan/ struktur organisasi terkait pemberhentian sebagai pengurus secara sepihak.	Mohon kebijakan dan dikembalikan sebagai pengurus.	Umum	- perlu klarifikasi dan cek apakah ada kaitan yayasan dengan pemerintah kab. pemalang atau hanya yayasan yang swasta
19	16/06/2023	06/06/2023	Daniel Sridodo	Pemerintah	permasalahan terkait status tanah pasar kembang Sari, kab. semarang	penyelesaian permasalahan	Pertanahan/Perumahan	klarifikasi atau teruskan ke Bupati Semarang

Total Tercatat : 72 (Tujuh Puluh Dua) Aduan Masyarakat

Periode : Tahun 2023

No.	Tanggal Masuk Surat Pengaduan ke Biro Hukum	Tanggal Surat Pengaduan	Nama/Pihak Pelapor	Pihak Terlapor	Isi Aduan	Keinginan Pelapor	Kategori Aduan	Keterangan
20	21/06/2023	25/05/2023	Zainudin/Herawati	Pemerintah	Pengadu ingin mengklaim tanah miliknya dengan program PTSL. Namun, pengadu tidak dapat mengklaim tanah tersebut dengan alasan yang disampaikan oleh KADES bahwa tanah tersebut telah bersertifikat atas nama orang lain.	Menginformasikan dan Memohon keadilan atas tanah tersebut	Pertanahan/Perumahan	- Maya - Sudah Upload - Surat fasilitasi proses naik - Surat Fasilitasi ke BPN Kab. Pekalongan sudah dikirim Kamis 13 Juli 2023 dgn tembusan ke Pengadu - Ada surat tanggapan (Jawaban) dari BPN Kab. Pekalongan ke Sekda Jateng tgl 28 Juli 2023 intinya terhadap objek tanah beratas nama Zakarias Haryadi bukan pengadu (Zainudin MZ)
21	07/06/2023	19/05/2023	Tubarkah, dkk	Notaris/PPAT Pongki Sugiarto, S. H, Mkn	Pelaporan dan atau aduan adanya dugaan tindak pidana penggelapan dokumen atau surat minuta jual beli tanah atau proses pelepasan hak dan bukti setor PPH yang diduga dilakukan oleh saudara notaris/PPAT Pongki Sugiarto, S.H, Mkn yang beralamat kantor di Jl. Urip Sumoharjo No.10, Kebrok, Desa Sambong, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah	Memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat	Pertanahan/Perumahan	- Maya dan Ikhsan - Sudah Upload - Pantau MPD Batang - Tembusan
22	19/06/2023	29/05/2023	Djunaidi	Masyarakat	Penjualan sertifikat tanah tanpa sepengetahuan pengadu	Bertemu Gubernur Jawa Tengah untuk menjelaskan detail permasalahan	Pertanahan/Perumahan	- Sudah Upload
23	07/06/2023	07/06/2023	Slamet	Masyarakat	Menuntut hasil panen selama 11 tahun (2012-2023) dan telah menghadap Kepala Sub Seksi Pemeliharaan Data Hak Tanah dan Pembinaan PPAT Kantor Pertanahan Kab. Semarang, namun belum ada kejelasan	Memohon kepada Kepala Biro Hukum Provinsi Jawa Tengah segera menindaklanjuti dan meminta keadilan hukum	Pertanahan/Perumahan	- Sudah upload
24	20/06/2023	12/05/2023	Ucik Arifina, Tri Widati, dkk	KSPPS Kospin Syariah Karanganyar	melakukan praktek usaha yang tidak sesuai AD/ART. Pelapor sebagai nasabah koperasi simpan pinjam KSPPS Kospin Syariah Karanganyar yang menjadi korban konkuren karena gagal bayar.	Memohon bantuan dalam penegakan keadilan sesuai dengan ketentuan hukum dan AD/ART yang berlaku.	Penyalahgunaan Wewenang oleh Aparatur	- Sudah Upload - sudah kordinasi ke dinkop dan jg ada aduan yg sama, butuh kordinasi lgsg dgn dinkop utk membuat tanggapan
25	03/07/2023	31/05/2023	Sutaryo	Masyarakat	Adanya penutupan jalan akses ke tempat pemakaman oleh pemilik barang rongsokan atas nama Pak Topo di desa Bibis Kelurahan Jungke Kecamatan Karanganyar, Kab Karanganyar	Memerintahkan kepada Pak Topo untuk membuka akses jalan dan dibersihkan seperti sedia kala	Umum	- sudah naik tapra - surat terusan ke Bupati untuk fasilitasi - sudah kirim 15 Agustus 2023
26	03/07/2023	23/05/2023	Suyono	Masyarakat	Adanya penggelapan mobil dengan nomor polisi AA 1274 HC. Pelaku sudah ditemukan dan kasus sudah diperoses dan diputus 2 tahun penjara namun sampai sekarang mobil belum bisa ditemukan	Harapan agar mobil bisa ditemukan	Umum	-Sudah scan

Total Tercatat : 72 (Tujuh Puluh Dua) Aduan Masyarakat

Periode : Tahun 2023

No.	Tanggal Masuk Surat Pengaduan ke Biro Hukum	Tanggal Surat Pengaduan	Nama/Pihak Pelapor	Pihak Terlapor	Isi Aduan	Keinginan Pelapor	Kategori Aduan	Keterangan
27	03/07/2023	22/05/2023	Mursini	BRI Unit Jati Kudus	Menginformasikan bahwa uang pengadu yang akan disetorkan untuk Deposito Investasi ternyata dijadikan Asuransi Jiwa BRI oleh pegawai Bank BRI tanpa sepengetahuan pengadu	Menuntut BRI LIFT mengembalikan semua uang yang telah disetorkan	Prosedur/Tatalaks ana/Regulasi	
28	03/07/2023	31/05/2023	Zainudin/Herawati (2)	Pemerintah	Bantuan karena sertifikat pelapor terbit atas nama orang lain yang di keluarkan oleh perangkat desa	penyelesaiin pembenaran sertifikat atas nama pelapor	Pertanahan/Perumahan	aduan kedua
29	03/07/2023	28/04/2023	Meliani Sabtuti	Pemerintah	Permohonan mediasi antara keluarga pelapor dengan Bupati Semarang atas penawaran tanah	mediasi dan penyelesaiin dengan Bupati semarang	Pertanahan/Perumahan	-kirim aduan lagi kedua
30	04/07/2023	09/07/2023	Siti Rahayu, S.H	Masyarakat	Dalam perkawinan antara Santosa dan Siti Sulasmi terdapat harta bersama berupa 2 buah rumah beserta bangunan namun pada saat perceraian belum sempat dibagi, timbul permasalahan perubahan nama yang diduga tidak sesuai prosedur atau cacat hukum, 1. Sertifikat HM No 02104 Atas nama Sentosa / Mangunharjo sekarang beralih menjadi atas nama Dewi Ratna Ningsih 2. Sertifikat HM No 02809 atas nama Santosa / Mangunharjo yang telah dibeli pada tahun 2007 melalui KPRBTN akan tetapi tidak ada bukti.	Memohon penjelasan atas perubahan yang ada berdasarkan apa? lalu jika tidak sesuai prosedur atau cacat hukum maka dimohon untuk dibatalkan.	Pertanahan/Perumahan	sudah scan
31	04/07/2023	17/06/2023	Dwi Rukminto	Badan Hukum, Bank Sinarmas - Semarang, BPR. Kusuma Sumbing - Sukorejo	Dwi Rukminto memiliki usaha dagang yang sempat kritis dikarenakan wabah Covid-19 sehingga pendapatannya merosot tajam. 1. Kredit macet di Bank Sinarmas - Semarang sejumlah Rp. +- 2,3 Milyar dengan jaminan Toko Sepoor Listrik terdiri dari bangunan 4 ruko salah satunya 3 lantai. 2. Kredit macet di BPR. Kusuma Sumbing Sukorejo sejumlah Rp. +- 1,82 Milyar dengan jaminan sertifikat hak milik seluas +- 700 M2 terdiri dari ruko 2 lantai serta rumah satu lantai. kedua bank bersikukuh untuk melelang jaminan yang ada.	Memohon petunjuk atau solusi apabila memungkinkan untuk ditake over ke lembaga keuangan lainnya atau perorangan dan atau mungkin bisa diteruskan di Kadin Jawa Tengah	Kredit Macet	sudah scan
32	03/07/2023	22/04/2023	Endang Susmiansih	Pemerintah, Kepala Desa/Lurah Klidang Lor	Hendak mengajukan hak atas tanah di BPN Kabupaten Batang akan tetapi proses terkendala dikarenakan Kepala Desa/Lurah Klidang Lor tidak mau memberikan/membubuhkan tanda tangan pada berkas surat pernyataan batas tanah-tanah tersebut, beralih/beralasan tidak tahu sehingga menghambat untuk melanjutkan proses pengajuan tersebut.	Membantu penyelesaian	Prosedur/Tatalaks ana/Regulasi	Belum scan

Total Tercatat : 72 (Tujuh Puluh Dua) Aduan Masyarakat

Periode : Tahun 2023

No.	Tanggal Masuk Surat Pengaduan ke Biro Hukum	Tanggal Surat Pengaduan	Nama/Pihak Pelapor	Pihak Terlapor	Isi Aduan	Keinginan Pelapor	Kategori Aduan	Keterangan
33	03/07/2023	01/07/2023	S. Darsono	Anggota Polisi Polres Banyumas	S. Darsono (pelapor) memiliki mobil yang dikemudikan oleh teman dari anaknya, yaitu Imam Subekti. Pada tanggal 28 Oktober 2022 Pukul 16.00 WIB, Imam Subekti mengalami insiden berupa diduga menyerempet Bpk. Heri yang merupakan Anggota Polisi Polres Banyumas yang berakibat retak tulang kaki kiri. Hal tersebut belum dapat dipastikan apakah dugaan tersebut benar karena tidak ada yang mau jadi saksi sebab Bpk. Heri dan istrinya adalah Anggota Polisi Polres Banyumas. Atas insiden tersebut Bpk. Heri menuntut ganti rugi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) padahal pengobatan sudah ditanggung BPJS dan ganti rugi sudah diberikan oleh Jasa Raharja. Bpk. Heri sangat tidak mungkin memenuhi tuntutan ganti rugi karena dia adalah masyarakat miskin (tidak punya rumah, pekerjaan penjual roti, mempunyai 3 anak, dan istri yang sakit-sakitan) sehingga S. Darsono (pelapor) membantu Bpk. Heri untuk membayarkan ganti rugi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang seharusnya digunakan untuk membayar pajak. Namun, Bpk. Heri menolak dan bersikukuh tetap meminta ganti rugi Rp. 20.000.000. Oleh karena tidak terpenuhi tuntutan tersebut, Bpk Heri menahan mobil S. Darsono di Satlantas Purwokerto Banyumas.	Pelapor meminta bantuan Bpk. Ganjar Pranowo selaku Gubernur Jawa Tengah untuk menyelesaikan masalahnya melalui jalur perdamaian	Penyalahgunaan Wewenang oleh Aparatur, Hukum/Peradilan dan Hak Asasi Manusia	Sudah discan
34	03/07/2023	08/04/2023	Titiek Sulistiati	Pemerintah, Kepala Kantor Pertanahan Kota Salatiga	Berdasarkan risalah berita acara pembetulan gambar peta SHM Nomor 43/Kelurahan Blotongan pada tanggal 13 April 1991 Noto Utama selaku pemegang SHM Nomor 43/Kelurahan Blotongan mengajukan permohonan pengukuran ulang dan penerbitan sertifikat pengganti atas SHM Nomor 43/Kelurahan Blotongan. Dalam penerbitan sertifikat terjadi perubahan pada gambar pada bidang tanah tersebut yaitu dengana adanya akses jalan dari bidang SHM Nomor 43/Kelurahan Blotongan hingga jalan raya yang semulanya tidak ada dan gambar peta jalan tersebut melintas diatas bidang tanah SHM Nomor 44/Kelurahan Blotongan atas nama Soerjo Soeparto, perubahan pada gambar tersebut dilakukan secara sepihak dan dilakukan tanpa izin oleh pemegang Hak SHM Nomor 44/Kelurahan Blotongan.	Meminta pemeriksaan dan pembetulan atas ketidaksesuaian gambar peta pada SHM Nomor 43/Kelurahan Blotongan	Pertanahan/Perumahan	belum scan - sudah naik tapra - tanggapan sudah jadi

Total Tercatat : 72 (Tujuh Puluh Dua) Aduan Masyarakat

Periode : Tahun 2023

No.	Tanggal Masuk Surat Pengaduan ke Biro Hukum	Tanggal Surat Pengaduan	Nama/Pihak Pelapor	Pihak Terlapor	Isi Aduan	Keinginan Pelapor	Kategori Aduan	Keterangan
35	28/02/2023	22/02/2023	Warga Kel. Pandansari, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang	Pemerintah, Lurah dan Camat Semarang Tengah, BPN	halangan untuk mengurus dan mengikuti program PTSL Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap. Halangan berasal dari pihak kelurahan, kecamatan maupun BPN yang lepas tangan dengan alasan yang tidak diketahui dengan jelas.	Menjembatani atau membantu warga kelurahan pandansari semarang tengah untuk proses sertifikasi tanah.	Pelayanan Masyarakat, Prosedur/Tatalaksana/Regulasi	sudah scan
36	03/07/2023	18/04/2023	Dr Amrizal Arief M. Kes (dispo kemendagri)	Pemerintah	pelimpahan atas surat pengaduan masyarakat terkait dugaan perlakuan zalim direktur utama RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten	menindaklanjuti pengaduan sebelumnya	Kepegawaian/Ketenagakerjaan	- siap kirim
37	05/07/2023	22/05/2023	Amin Fauzi	koperasi	perkara tindak pidana perbankan dan pencucian uang koperasi abal abal	permohonan dukungan, atensi, bantuan keadilan dan perlindungan hukum	Umum	
38	14/07/2023	23/06/2023	Sarinah Warga Kab. Wonosobo	Masyarakat	Pengaduan terkait pengambilan lahan parkir dan pemberhentian juru parkir secara paksa oleh seorang anggota dewan di Desa Garung, Kec. Garung	Mengembalikan lahan parkir tersebut kepada pengelola lahan parkir tersebut	Penyalahgunaan Wewenang oleh Aparatur	Sudah Upload
39	14/07/2023	01/07/2023	Maskum	Pemerintah	Mengenai pengaduan terkait standar operasional prosedur membawa barang keperluan napi di lapas purwokerto dan mahal nya barang di kantin lapas	Mohon ditindaklanjuti	Prosedur/Tatalaksana/Regulasi	- siap kirim
40	14/08/2023	22/07/2023	Haryono warga desa Nglungger	Masyarakat	Pengrusakan rumah milik Haryono yang dilakuka oleh sdr ISMUN BIN JUPRI dkk di desa Nglungger Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora. Pengrusakan dilakukan dengan cara melempari rumah Haryono menggunakan batu serta merobohkan rumah dengan menarik rumah Haryono yang terbuat dari kayu menggunakan tali tampar hingga roboh.	Sdr Haryono sebagai pelapor menginginkan pihak biro hukum membantu mendapatkan keadilan terkait permasalahannya yang belum juga terselesaikan	Hukum/Peradilan dan Hak Asasi Manusia, Umum	SHAM, surati yang bersangkutan sesuai kewenangan
41	14/08/2023	24/07/2023	Teguh Wahyudi Warga	Masyarakat	Atas Nama Bp Ibnu (terlapor) yang mengaku sebagai orang terdekat bapak gubernur, delapan orang warga Jolotundo II RT 07 RW 02 mempercayakan pengurusan sertifikat wilayah kepada Bp Ibnu namun sejak tanggal 22 Januari 2023 sampai 17 Juli 2023 tidak juga ditemui kabar baik akan tetapi para warga sudah mengeluarkan biaya sebesar Rp 2.900.000 x 8 orang = Rp 23.200.000 dan meminjam motor sonix plat (K 3921 SJ). nomor terlapor juga tidak dapat dihubungi	pelapor memohon bantuan untuk kejelasan sertifikat wilayah	Pungutan Liar/Korupsi, Pertanahan/Perumahan, Hukum/Peradilan dan Hak Asasi Manusia, Prosedur/Tatalaksana/Regulasi	SHAM, difasilitasi/ klarifikasi

Total Tercatat : 72 (Tujuh Puluh Dua) Aduan Masyarakat

Periode : Tahun 2023

No.	Tanggal Masuk Surat Pengaduan ke Biro Hukum	Tanggal Surat Pengaduan	Nama/Pihak Pelapor	Pihak Terlapor	Isi Aduan	Keinginan Pelapor	Kategori Aduan	Keterangan
42	12/09/2023	04/09/2023	PT Raja Batu Putih Indonesia	Pemerintah	Pengajuan Permohonan Pemeriksaan UKL-UPL Rencana Kegiatan Eksplorasi Kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah ("DLHK Jateng")	Permohonan arahan serta pemenuhan kewajiban sesuai peraturan yang berlaku agar dapat melaksanakan kegiatan eksplorasi atau penyelidikan potensi dan kualitas batu gamping secara ilmiah	Prosedur/Tatalaksana/Regulasi	sudah upload
43	04/09/2023	16/08/2023	Warga Kabupaten Kudus	Ormas Lindu Aji Kudus	Salah satu keluarga korban penganiayaan melaporkan Ormas Lindu Aji Kudus terkait adanya penganiayaan yang dilakukan pada tanggal 20 Agustus 2023 bertempat di Cafe Karaoke GOLD dengan jumlah korban 4 orang (3 luka-luka, 1 meninggal dunia)	Memohon keadilan kepada pihak kepolisian untuk segera menangkap para pelaku	Hukum/Peradilan dan Hak Asasi Manusia	SHAM, cek pengirimnya (sampul surat)
44	22/09/2023	27/08/2023	Dr.H. Maryadi, Drs. Mpd	Masyarakat	Penyampaian data sengketa tanah dan kondisi riil tanah di tawang Sari.	Mendapatkan ijin secara yuridic formal sesuai aturan yang berlaku atas tanah yang di anggap menjadi milik dari pengadu dengan bukti dan saksi yang dimiliki	Pertanahan/Perumahan	
45	22/09/2023	27/07/2023	Hermayanti Sri Purwaningsih	Masyarakat	dugaan melakukan perbuatan melanggar profesi sebagai polisi karena menerima penitipan sertifikat juga dugaan melakukan perbuatan melawan hukum yang dianggap melakukan pemufakaatan jahat bersama dengan Gangsar dkk.	mendapatkan keadilan dalam menegakan supermasi hukum yanng utuh tanpa tebang pilih atas hak yang dirasa menjadi milik pengadu	Penyalahgunaan Wewenang oleh Aparatur	SHAM Di Klarifikasi
46	16/10/2023	21/09/2023	CASMOYO	Masyarakat	Permohonan Keringanan Pelunasan	Permohonan keringanan pelunasan pinjaman di BRI Kantor Cabang Batang sejumlah pokok hutang yaitu 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) dengan tempo pembayaran diangsur selama 1(satu) tahun sejak permohonan ini dikabulkan	Pertanahan/Perumahan	-Ditindaklanjuti untuk dikaji dan dijawab sesuai kewenangan

Total Tercatat : 72 (Tujuh Puluh Dua) Aduan Masyarakat

Periode : Tahun 2023

No.	Tanggal Masuk Surat Pengaduan ke Biro Hukum	Tanggal Surat Pengaduan	Nama/Pihak Pelapor	Pihak Terlapor	Isi Aduan	Keinginan Pelapor	Kategori Aduan	Keterangan
47	17/10/2023	07/08/2023	Buhari Sutarno	Masyarakat	Permohonan Keringanan Pelunasan	Mengajukan permohonan keringanan pelunasan sisa pokok hutang di PT. BRI (Persero) Tbk. Cabang Batang sesuai kemampuan kami yaitu sebesarRp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan akan segera kami selesaikan begitu permohonan ini dikabulkan dengan cara mengansur dalam tempo satu tahun.	Pelayanan Masyarakat	Koord 2 > dijawab sesuai kewenangan
48	16/10/2023	28/07/2023	JUNARIYO	Badan Hukum	mengajukan permohonan keringanan pelunasa di BPR Central Artha Pekalongan dan akan segara dilunasi dalam tempo satu tahun bbegitu permohonan dikabulkan	Permohonan Keringanan Pelunasan	Pelayanan Masyarakat	-ditindaklanjuti untuk dikaji -dijawab sesuai kewenangan
49	16/10/2023	23/08/2023	Kusniasih Rusmani	Badan Hukum	Permohonan Keringanan Pelunasan	Permohonan keringanan pelunasan di PT. Bank Mandiri (Persero Cabang Pekalongan) sesuai kemampuan kami yaitu sebesar Rp 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dan kami selesaikan begitu permohonan dikabulkan dalam tempo satu tahun	Pelayanan Masyarakat, Umum	sudah di scan
50	16/10/2033	20/09/2023	DESSY ASTRYANI	Badan Hukum	Permohonan Keringanan Pelunasan pinjaman di BRI Kantor Cabang Batang, sulit memenuhi kewajiban karena sudah tidak memiliki kewaiban tetap	Permohonan Keringanan Pelunasan	Pertanahan/Perumahan	-dijawab sesuai kewenangan
51	16/10/2023	11/10/2023	Meiliani Sabtuti	Pemerintah, Masyarakat	Permohonan menawarkan rumah dan tanah di Jl. Pemuda No.5 / HOS Cokroaminoto, Ungaran, Semarang, Jawa Tengah	Menjual tanah warisan tersebut namun tidak ada yang mau beli dikarenakan dihalangain kios-kios yang dibangun pemda	Pertanahan/Perumahan, Hukum/Peradilan dan Hak Asasi Manusia	Koord 2 > fasilitasi aduan terdahulu
52	01/10/2023		Ahmad Nahrodin	Pemerintah Desa	PTSL	Proses PTSL	Pertanahan	- belum ada scan
53	01/10/2023		Masyarakat Desa Songgom	Pemerintah Desa	Dugaan Penggunaan Dana Desa	Ditindaklanjuti dg Pencopotan Kades	Dugaan Tindak Pidana	lanjutan tahun 2022

Total Tercatat : 72 (Tujuh Puluh Dua) Aduan Masyarakat

Periode : Tahun 2023

No.	Tanggal Masuk Surat Pengaduan ke Biro Hukum	Tanggal Surat Pengaduan	Nama/Pihak Pelapor	Pihak Terlapor	Isi Aduan	Keinginan Pelapor	Kategori Aduan	Keterangan
54	01/10/2023		Diajeng Mutiari	Kantah Kota Semarang	PTSL	Proses PTSL	Pertanahan	lanjutan tahun 2022
55	01/10/2023		Edi Purwanto	Pemerintah Desa	Dugaan Penipuan	Agar ditindaklanjuti sesuai peraturan	Dugaan Tindak Pidana	lanjutan tahun 2022
56	01/10/2023		Masyarakat Surakarta	Kantor Imigrasi Surakarta	Calo dalam pelayanan paspor	Agar oknum diberhentikan	Pelayanan Masyarakat	
57	01/10/2023		PT Niti Buana	Masyarakat	Fasum Fasos perumahan	Agar Fasum Fasos dimaksud digunakan sesuai peruntukan	Pertanahan	
58	01/10/2023		Slamet Diadi	MAasyarakat	Dugaan Penyerobotan tanah	Agar diselesaikan kasusnya	Pertanahan	
59	01/10/2023	05/09/2023	PEMDES	Wakapolsek Kebonagung	Dugaan Intimidasi WakapolsekKebonagung	Agar Wakapolsek ditindak sesuai ketentuan	Dugaan Tindak Pidana	Sudah terfasilitasi
60	20/10/2023	15/10/2023	Herwaskito	Kantah Kota Semarang	Mohon agar dapat menerima dana kerohiman	Mohon agar dapat menerima dana kerohiman	Pertanahan	Sudah terfasilitasi
61	20/11/2023	15/10/2023	Maryadi	Kantah Kab Semarang	terkait batas tanah	Mohon agar disesuaikan batas tanahnya	Pertanahan	Sudah terfasilitasi
62	11/10/2023	10/10/2023	Marwaji	PLN	Ganti Rugi penebangan pohon pada area SUTT	agar diberikan ganti kerugian	Pelayanan Publik	Sudah Koordinasi dengan PLN
63	05/09/2023	04/09/2023	Laporgub/LGWP48 505768	PT. Rumah Masa Depan	Bantuan pendampingan hukum	Agar difasilitasi Bantuan Hukum	Ketenagakerjaan	Sudah difasilitasi
64	05/09/2023	-	H. Zaenudin					
65			Zar & Partner	Kantah cilacap	Ganti kerugian	Agar nilai ganti ruginya sesuai		
66			Endar Susilo	RM Miroso	Bangunan liar	agar ditertibkan		
67			Andreas TAengkeng	KAntah Wonosobo	Pungli	agar ditertibkan punglinya		
68			Heriawan	PT. KAI	Tumpang tindih tanah			
69			Subali	Pemerintah Kota Smg	Permohonan HGB diatas HPL	Dipenuhi permohonannya		
70			Iman wahyudi	PT. Kembang Sepatu Property	Gugaan penipuan perumahan	Agar dikembalikan uangnya		
71			Aduan Toelle	PT. Bhimasena Power Indonesia	Mohon lahan pengganti	agar diberikan lahan pengganti		

Total Tercatat	: 72 (Tujuh Puluh Dua) Aduan Masyarakat
Periode	: Tahun 2023

No.	Tanggal Masuk Surat Pengaduan ke Biro Hukum	Tanggal Surat Pengaduan	Nama/Pihak Pelapor	Pihak Terlapor	Isi Aduan	Keinginan Pelapor	Kategori Aduan	Keterangan
72			Wahyu Eka	-	ingin mengurus perceraian ke PA, namun dokumen hilang/dibawa kabur mantan suami (secara agama sudah bercerai), kendalanya menikah dulu di Jambi, sehingga utk penerbitan kutipan nikah harus KUA setempat ketika dulu menikah (Jambi)	Agar kutipan buku nikah bisa terurus	perdata	- sudah kordinasi dengan LBH Sakti Purworejo yang mendampingi - LBH sudah menyurati KUA Ngombol utk memohon fasilitasi - Perlu kordinasi lanjutan dengan kanwil kemenag dan KUA, LBH dan DP3A Purworejo

**REKAPITULASI NILAI KKP HAM DAN AKSI HAM TAHUN 2022
PADA LAMPIRAN PIAGAM PENGHARGAAN KAB/KOTA PEDULI HAM NOMOR: M.HH-03.HA.02.01 TAHUN 2023
PROVINSI JAWA TENGAH**

NO	KABUPATEN/KOTA	NILAI CAPAIAN KKP HAM										NILAI KKP HAM	NILAI AKSI HAM	TOTAL NILAI
		Bantuan Hukum	Informasi	Turut Serta Pemerintahan	Keberagaman & Pluralisme	Kependudukan	Kesehatan	Pendidikan	Pekerjaan	Lingkungan	Perempuan & Anak			
1	Kab. Cilacap	80	100	55	50	90	82	79	70	91	95	79.2	2	81.2
2	Kab. Banyumas	100	100	100	70	90	89.5	77	63	96	85	87.05	5	92.05
3	Kab. Purbalingga	100	100	100	60	95	88.5	84	80	98	95	90.05	9.95	100
4	Kab. Banjarnegara	100	100	70	55	95	91.5	82	72	82	95	84.25	5	89.25
5	Kab. Kebuman	80	100	100	90	0	86.5	78	73	94	95	79.65	10	89.65
6	Kab. Purworejo	100	100	100	100	95	93	87	80	78	95	92.8	7.2	100
7	Kab. Wonosobo	100	100	100	90	95	90	77	76	69	94	89.1	2	91.1
8	Kab. Magelang	20	85	100	50	90	85.5	77	26	97	65	69.55	5	74.55
9	Kab. Boyolali	80	100	90	50	95	88.5	81	76	92	95	84.75	7	91.75
10	Kab. Klaten	100	100	100	55	95	91.5	85	75	94	95	89.05	10	99.05
11	Kab. Sukoharjo	100	100	100	100	79	90	87	67	92	92	90.7	9.3	100
12	Kab. Wonogiri	80	85	100	60	95	89	82	76	89	79	83.5	2	85.5
13	Kab. Karanganyar	100	100	100	80	95	88	85	72	96	100	91.6	5	96.6
14	Kab. Sragen	60	100	60	80	90	93	91	75	92	93	83.4	2	85.4
15	Kab. Grobogan	100	100	100	90	90	86	79	73	79	83	88	2	90
16	Kab. Blora	80	85	100	90	90	83	79	56	72	100	83.5	2	85.5

17	Kab. Rembang	100	100	100	60	90	87.5	79	72	94	91	87.35	2	89.35
18	Kab. Pati	100	100	90	35	80	86	87	62	55	40	73.5	2	75.5
19	Kab. Kudus	80	100	100	85	95	87.5	89	67	98	88	88.95	5	93.95
20	Kab. Jepara	100	100	100	50	90	88	80	71	84	96	85.9	5	90.9
21	Kab. Demak	100	100	100	55	100	87	87	70	95	95	88.9	10	98.9
22	Kab. Semarang	100	100	100	60	95	88.5	74	76	94	92	87.95	10	97.95
23	Kab.Temanggung	80	100	100	90	95	87.5	76	70	95	79	87.25	5	92.25
24	Kab. Kendal	100	100	100	100	95	80.5	85	70	95	95	92.05	7	99.05
25	Kab. Batang	100	100	100	60	100	86.5	77	79	100	95	89.75	5	94.75
26	Kab. Pekalongan	100	75	100	50	78	86.5	86	67	70	89	80.15	7	87.15
27	Kab. Pemalang	60	100	100	100	95	86	78	73	67	100	85.9	7	92.9
28	Kab. Tegal	100	100	100	90	85	86.5	84	79	78	89	89.15	2	91.15
29	Kab. Brebes	100	100	100	60	90	84	62	80	77	75	82.8	5	87.8
30	Kota Magelang	80	70	60	45	95	95.5	90	80	100	69	78.45	0	78.45
31	Kota Surakarta	100	100	100	100	95	87	90	76	94	87	92.9	7	99.9
32	Kota Salatiga	80	100	100	90	90	95	87	77	77	94	89	2	91
33	Kota Semarang	100	100	100	90	90	93.5	85	79	100	95	93.25	6.75	100
34	Kota Pekalongan	100	100	95	100	90	94.5	71	65	97	77	88.95	2	90.95
35	Kota Tegal	100	100	100	90	90	87.5	91	60	97	71	88.65	5	93.65